

DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI
DAN REHABILITASI HUTAN



2022

**LAPORAN
KINERJA**

LAPORAN KINERJA T A H U N 2 0 2 2



DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN

Kata Pengantar

Laporan kinerja Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada Ditjen PDASRH atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Program yang diemban.

Akuntabilitas kinerja Ditjen PDASRH tahun 2022 diukur berdasarkan penetapan ukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja antara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Direktur Jenderal PDASRH tahun 2022 serta sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Ditjen PDASRH tahun 2020- 2024.

Dalam laporan ini disampaikan tentang pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja yang merupakan hal terpenting dalam penyusunan laporan kinerja, dengan mengacu Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Secara keseluruhan capaian kinerja program dalam mewujudkan sasaran Ditjen PDASRH tahun 2022 adalah sebesar 100,86%, dengan capaian pelaksanaan anggaran sebesar 96,15%. Hasil ini mencerminkan kinerja Ditjen PDASRH di tahun 2022 sangat luar biasa, dan tentu saja masuk dalam kategori kinerja sangat baik dan efisien.

Melalui Laporan Kinerja Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian pelaksanaan tugas dan fungsi Ditjen PDASRH tahun 2022. Kiranya laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

DIREKTUR JENDERAL PDASRH,

**Ir. DYAH MURTININGSIH, M.Hum.
NIP. 19690802 199803 2 001**



Ringkasan Eksekutif

Kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kementerian/Lembaga menuntut penataan organisasi dan tata kerja tak terkecuali yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan termasuk unit organisasi di bawahnya. Melalui Peraturan Menteri LHK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, nomenklatur Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) berubah menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH). Sehingga perlu penyesuaian terhadap tugas dan fungsi dan/atau sasaran dan indikator kinerja.

Sebagai bentuk proses adaptasi terhadap perubahan tugas, fungsi dan struktur organisasi menyebabkan adanya perubahan Rencana Strategis Kementerian LHK (Permen LHK nomor 1 tahun 2022). Ditjen PDASRH juga telah melakukan penyesuaian terhadap Dokumen Rencana Strategis Ditjen PDASRH 2020-2024 melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan Nomor : SK.12/PDASRH/SET/REN.0/3/2022. Selanjutnya perencanaan strategis tersebut dituangkan secara konkret ke dalam Rencana Kerja (Renja) Ditjen PDASRH, yang di dalamnya memuat kinerja, outcome, output, dan kebutuhan anggaran.

Ditjen PDASRH mengampu tiga program yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK, yaitu dukungan manajemen, pengelolaan hutan berkelanjutan dan kualitas lingkungan hidup. Terdapat 3 (tiga) sasaran yang akan dicapai Ditjen PDASRH yaitu meningkatnya pengelolaan danau prioritas nasional, meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada DAS dan meningkatnya akuntabilitas kinerja Ditjen PDASRH. Dalam pencapaian sasaran tersebut, pada tahun 2022 telah ditetapkan perjanjian kinerja dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP), yaitu menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS sebesar 8,08%, luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi seluas 30.850 Ha, jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya sejumlah 15 danau serta nilai SAKIP Ditjen PDASRH sebesar 78 poin.

Sesuai dengan uraian visi Ditjen PDASRH yaitu *"DAS lestari untuk meningkatkan kualitas sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat"* dalam mendukung *"terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat"*, maka seluruh upaya pencapaian kinerja Ditjen PDASRH dilakukan dengan *effort* yang luar biasa. Seluruh waktu, tenaga dan biaya sebagian besar diarahkan dalam usaha pemulihan lahan kritis berbasis masyarakat untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat.

100,86%

KINERJA FISIK

Realisasi fisik dari rata-rata pencapaian 4 (empat) Indikator Kinerja Program (IKP)

96,15%

KINERJA KEUANGAN

Realisasi anggaran tahun 2022 sebesar Rp.1,49 T dari pagu sebesar Rp.1,55 T

1,05

EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN

Penggunaan anggaran masuk kategori efektif dalam pemenuhan target sasaran.

Secara total kinerja fisik Ditjen PDASRH pada tahun 2022 tercapai sebesar 100,86%. Untuk capaian kinerja masing-masing IKP, yaitu menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS tercapai 112,13%, luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi tercapai 99,55%, jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya tercapai 100% serta nilai SAKIP Ditjen PDASRH tercapai 91,77%. Sedangkan untuk kinerja keuangan terealisasi sebesar 96,15%. Berdasarkan pengukuran efisiensi (ratio kinerja fisik dengan kinerja keuangan), kinerja Ditjen PDASRH termasuk ke dalam kategori efisien (> 1). Penggunaan anggaran efektif untuk memenuhi sasaran yang ditargetkan.

Keberhasilan tahun ini tentu saja tidak hanya ditentukan oleh kinerja Ditjen PDASRH sendiri bersama Unit Pelaksana Teknis di daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan di sektor lain bahkan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat yang ikut berperan dalam pencapaian kinerja Ditjen PDASRH. Ke depan Ditjen PDASRH akan berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan manajemen, dan meningkatkan akuntabilitas kinerja guna meningkatkan pelayanan dan kepercayaan publik.



Daftar Isi

RINGKASAN EKSEKUTIF

01

PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Potensi dan Permasalahan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi

02

PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Rencana Strategis Ditjen PDASRH Tahun 2020-2024
- C. Rencana Kerja Ditjen PDASRH Tahun 2022
- D. Perjanjian Kinerja Ditjen PDASRH Tahun 2022

03

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Ditjen PDASRH
- B. Capaian Kinerja Program
- C. Capaian Kinerja Kegiatan
- D. Capaian Kinerja Prioritas Nasional
- E. Realisasi Anggaran

04

PENUTUP



01



PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Potensi dan Permasalahan
- C. Tugas dan Fungsi
- D. Struktur Organisasi



A. Latar Belakang

Perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Hutan Lindung (Ditjen PDASHL) menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (Ditjen PDASRH) termasuk unit kerja di bawahnya merupakan bentuk adaptasi atas kebijakan penyederhanaan birokrasi di Kementerian LHK. Hal ini diikuti dengan penyesuaian terhadap tugas dan fungsi dan/atau sasaran termasuk indikator kinerjanya.

Pelaksanaan kinerja tahun 2022 sejatinya masih merupakan keberlanjutan pelaksanaan rencana kerja tahun sebelumnya dan menjadi rangkaian pelaksanaan rencana strategis Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan tahun 2020-2024. Sehingga pelaksanaannya merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis dengan tujuan akhir DAS lestari untuk meningkatkan kualitas sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan tahun 2022 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial (HITS), serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan sekedar karena tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Sehingga dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan tahun 2022 diprioritaskan pada beberapa aspek, meliputi aspek sumberdaya alam dan lingkungan, ekonomi serta sarana dan prasarana.

Di dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan tentu saja harus dapat melaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*, salah satunya akuntabilitas. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan kinerja disusun untuk memenuhi amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Selain itu, laporan kinerja juga bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat (Menteri LHK) atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai di tahun 2022 serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya.

B. Potensi dan Permasalahan

Direktorat Jenderal PDASRH memiliki sumber daya yang menjadi potensi untuk mencapai target-target pembangunan dan juga mempunyai permasalahan yang dapat menghambat upaya untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMN 2020-2024.

Potensi yang dimiliki antara lain :

1. Luas kawasan hutan lindung mencapai 29,66 Juta Ha, atau sekitar 23,55% dari total kawasan hutan yang telah dikukuhkan. Sementara itu, luas keseluruhan daratan yang ada di wilayah Indonesia adalah seluas 188,0 juta hektar (SLHI. 2017. KLHK, Jakarta). Jika dibandingkan dengan luas keseluruhan daratan, berarti luas kawasan hutan lindung di daratan (terrestrial) seluas 29,66 juta hektar mencapai sekitar 15,78%.
2. Potensi sumber daya air di Indonesia pada tahun 2017 adalah 3,9 triliun m³ /tahun. Namun, baru sekitar 691,3 juta m³ /tahun (17,7%) yang dimanfaatkan sebagai sumber air baku (BPS, 2017 dalam SLHI)
3. Sebanyak 108 DAS yang telah ditetapkan dalam RPDAST akan diprioritaskan seluruhnya, terutama untuk rencana kegiatan RHL selama tahun 2020-2024. Serta terdapat 15 Danau Prioritas Nasional untuk dibenahi dan dikembangkan karena telah mengalami tingkat kerusakan kritis sehingga menjadi prioritas nasional.

Permasalahan yang dihadapi antara lain :

1. Kuantitas sumber daya air adalah tidak proporsionalnya ketersediaan air dibandingkan dengan jumlah penduduk di provinsi-provinsi di Indonesia.
2. Jumlah lahan kritis terus menurun, tetapi jumlahnya masih cukup luas yaitu 14,006 juta hektar pada tahun 2018. Tren penurunan lahan kritis yang telah dicapai selama ini, sesungguhnya bukan semata-mata hasil intervensi dalam bentuk program, melainkan adanya perubahan metode perhitungan kondisi lahan kritis sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Hingga tahun 2018 sebanyak 2.149 DAS (12,58%) atau seluas 106.884.470 hektar (56,47 %) yang perlu dipulihkan daya dukungnya, dan jumlah DAS yang dipertahankan daya dukungnya adalah sebanyak 14.927 DAS (87,42%) atau seluas 82.394.283 hektar (43,53%).
4. Laju deforestasi pada periode 2016-2017 di atas adalah 496 ribu Ha/Thn, sementara laju kegiatan RHL (kemampuan pemerintah) \pm 200.000 Ha/Thn setiap tahun anggaran, berarti terdapat kesenjangan sekitar \pm 230.000 – 250.000 Ha/Thn, dan karenanya harus dicarikan solusi untuk mengatasinya.
5. Bencana alam yang paling sering terjadi di Indonesia selama kurun waktu 2008- 2016, adalah bencana yang terkait dengan Hidrometeorologi yaitu bencana yang dipengaruhi oleh cuaca dan aliran permukaan, meliputi bencana hidrologi (62,5%), diikuti oleh bencana meteorologi (27,6%), bencana klimatologi (8,8%), dan bencana geofisik (1,1%).
6. Tingkat pertumbuhan penduduk di Indonesia yang cukup tinggi menjadi faktor penekanan utama terjadinya perubahan tata guna lahan, diantaranya adalah peningkatan kebutuhan akan lahan untuk permukiman/tempat tinggal, pembangunan infrastruktur dan aktivitas pembangunan lainnya.
7. Komitmen Pemegang Ijin Pinjam Pakai Kawasan Hutan yang masih rendah.



C. Tugas dan Fungsi

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, serta sebagai tindak lanjut kebijakan penyederhanaan birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah melakukan penataan organisasi dan tata kerja sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Berikut Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan.

Tugas :

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan daya dukung daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan.

Fungsi :

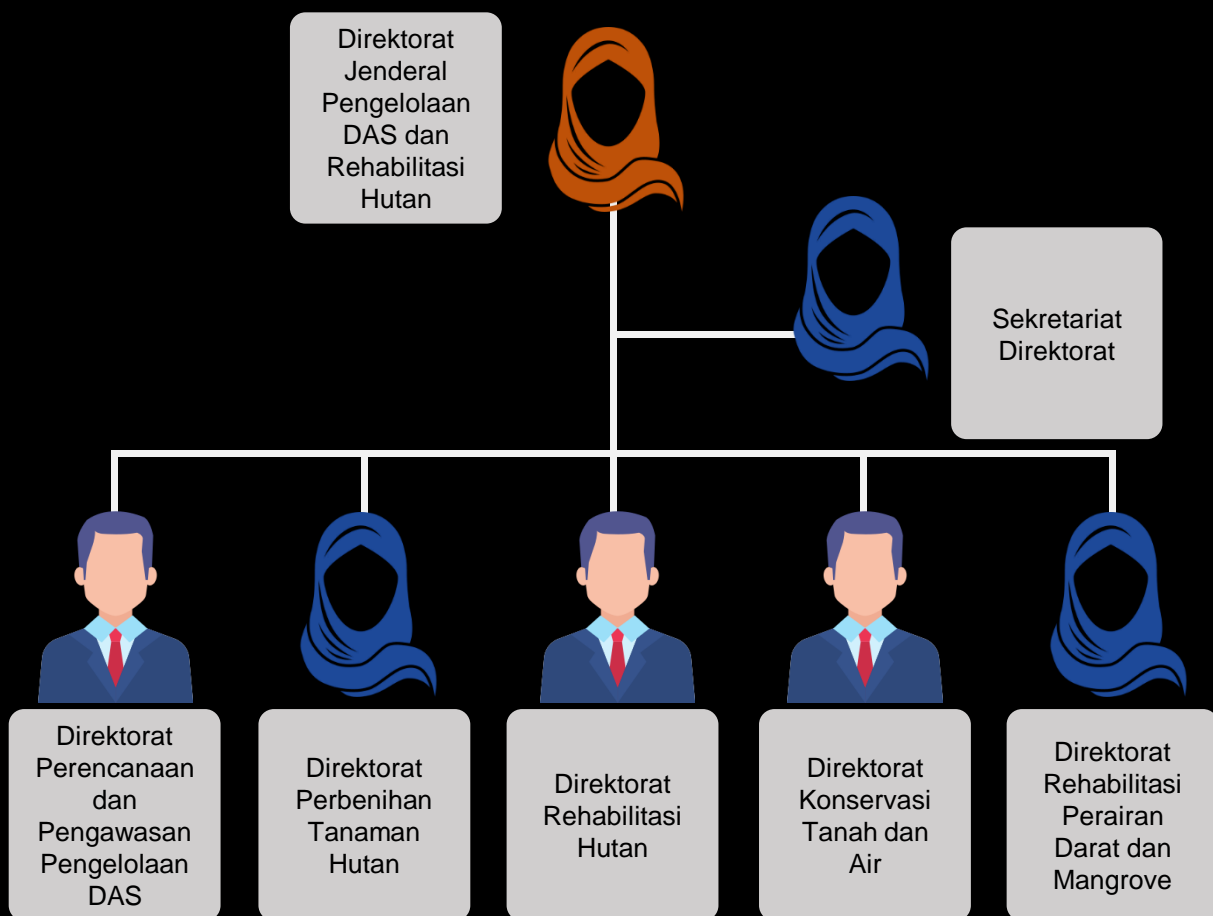
1. Perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
3. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
4. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
5. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
6. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyelenggaraan pengelolaan daerah aliran sungai, perbenihan tanaman hutan, rehabilitasi hutan dan lahan, konservasi tanah dan air, dan pengendalian kerusakan ekosistem perairan darat;
7. Pelaksanaan tugas administrasi direktorat jenderal pengelolaan daerah aliran sungai dan rehabilitasi hutan; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

D. Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan terbagi atas Sekretariat Direktorat dan 6 (enam) Direktorat Teknis. Dalam mengoptimalkan tugas pelayanan pembangunan bidang Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan, ada sebanyak 36 Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah di seluruh Indonesia, yaitu 34 unit Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai (BPDAS) dan 2 unit Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH).

STRUKTUR ORGANISASI

Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan



Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Ditjen PDASRH memiliki sumber daya manusia yang tersebar baik di pusat maupun daerah. Total jumlah pegawai lingkup Ditjen PDASRH saat ini (per Januari 2023) sebanyak 2.583 orang baik dengan status ASN/PNS maupun PPNPM.



Sebaran
1.493 Pegawai PNS lingkup Ditjen PDASRH



62%

931 Orang



38%

562 Orang

PUSAT

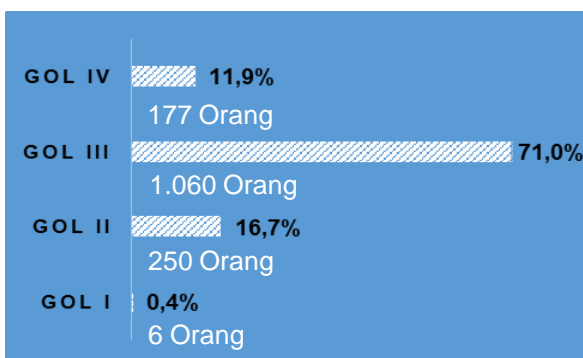
14%

206 Orang

U P T

86%

1.287 Orang



02

PERENCANAAN KINERJA

- A. Visi dan Misi
- B. Rencana Strategis Ditjen PDASHL Tahun 2020-2024
- C. Rencana Kerja Ditjen PDASHL Tahun 2022
- D. Perjanjian Kinerja Ditjen PDASHL Tahun 2022



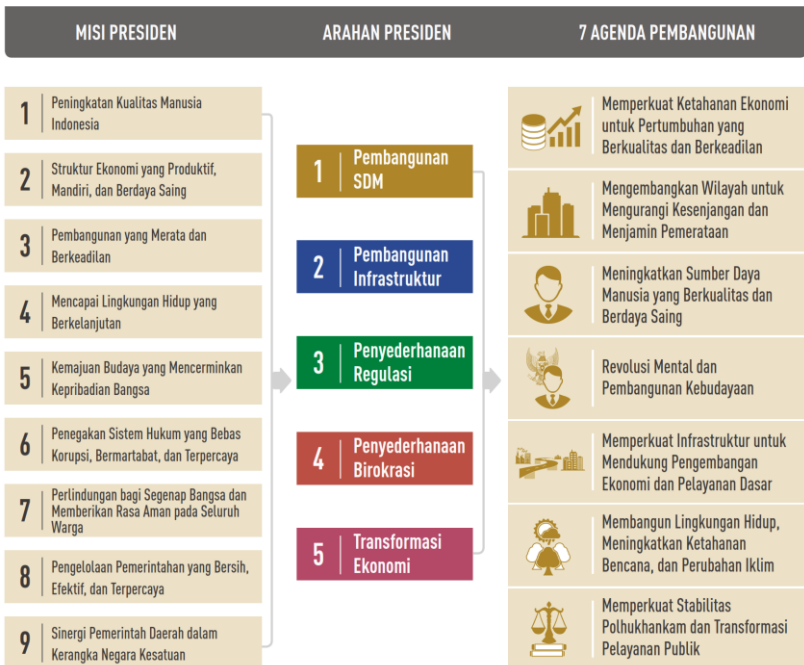


A. Visi dan Misi

Berdasarkan arahan Presiden RI, bahwa seluruh Menteri harus menjabarkan visi dan misi Presiden tahun 2020-2024. Berkenaan dengan hal tersebut, maka Kementerian LHK beserta jajaran unit kerja yang berada di bawahnya berkewajiban untuk mengadopsi dan menguraikan lebih lanjut visi dan misi Presiden.

VISI PRESIDEN

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong



Dukungan Kementerian LHK dalam RPJMN 2020-2024

PN/AP 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

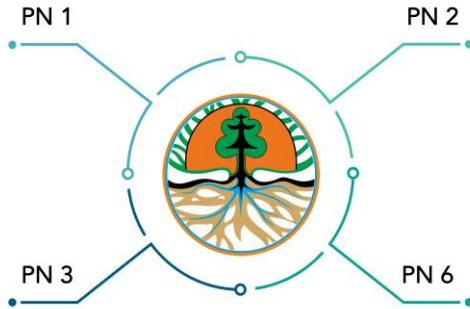
PP 2. Peningkatan kualitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

PP 6. Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, investasi di sektor riil, dan industrialisasi

PN/AP 3 Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing

PP 6. Pengentasan Kemiskinan

PP 7. Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing



Keterangan :
 PN = Prioritas Nasional'
 AP = Agenda Pembangunan
 PP = Program Prioritas

PN/AP 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan

PP 4. Pembangunan wilayah Kalimantan

PN/AP 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim

PP 1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup

PP 2. Peningkatan Ketahanan bencana dan iklim

PP 3. Pembangunan Rendah Karbon

Dukungan Ditjen PDASRH dalam RPJMN 2020-2024

PN 1

PN/AP 1

Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan

PP2.

Peningkatan kualitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

KP5.

Peningkatan kualitas/ketersediaan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi

Pro-PN2.

Revitalisasi/ Penyelamatan Danau Prioritas Nasional

PN 2

PN/AP 1

Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan

PP4.

Pembangunan wilayah Pulau Kalimantan

KP3.

Pengembangan kawasan perkotaan

Pro-PN4.

Pembangunan Ibu Kota Negara

PN 6

PN/AP 1

Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim

PP2.

Peningkatan ketahanan bencana dan iklim

KP2.

Peningkatan ketahanan iklim

Pro-PN1.

Perlindungan Kerentanan Pesisir dan Sektor Kelautan

Pro-PN2.

Perlindungan Ketahanan Air pada Wilayah Berisiko Iklim



Dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (AP) atau Prioritas Nasional (PN), Ditjen PDASRH mendukung 3 dari 4 AP/PN yang di ampu oleh KLHK.

Uraian Visi dan Misi Ditjen

Dengan berpedoman pada rumusan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden serta Kementerian LHK, maka uraian visi Ditjen PDASRH tahun 2020-2024 yaitu :

“DAS Lestari untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung “Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat”

Selanjutnya, dalam Renstra Ditjen PDASRH juga telah ditetapkan 2 (dua) misi, 2 (dua) tujuan dan 3 (tiga) sasaran strategis sebahai berikut.

Misi	Tujuan	Sasaran
1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas	1. Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim	1. Meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional 2. Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai
2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik	2. Tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima	3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja

Tujuan dan sasaran strategis tersebut mencerminkan *outcome* Ditjen PDASRH sesuai dengan tugas dan fungsinya yang pelaksanaannya diimplementasikan oleh seluruh unit eselon II dan seluruh UPT lingkup Ditjen PDASRH.

B. Rencana Strategis Ditjen PDASRH Tahun 2020-2024

Arah kebijakan yang akan diterapkan pada Kementerian LHK mencakup menata nilai-nilai, membangun struktur organisasi, menata anggaran dan merancang perubahan serta mempermudah regulasi.

Penataan nilai-nilai

Dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bermuara pada kondisi lingkungan yang semakin baik, nyaman ditinggali dan menjadi bekal dalam pembangunan berkelanjutan;
- 2) Aktualisasi potensi sumberdaya alam di lingkungan hidup dan kehutanan berbasis ilmu dan teknologi, *circular economy* dan mendukung langsung sasaran pembangunan nasional;
- 3) Transformasi keberadaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan sebagai faktor-faktor produksi untuk membantu pemerataan antar wilayah;
- 4) Keberhasilan pembangunan tak hanya direduksi dengan penyelesaian administrasi, tetapi harus terlihat wujudnya di tapak.

Membangun struktur organisasi

Dilakukan bersamaan dengan diterbitkannya PermenLHK No 15 Tahun 2021, yang mengatur struktur organisasi Direktorat Jenderal PDASRH. Ditjen PDASRH terdiri dari enam Unit Kerja Eselon II, yaitu Sekretariat Ditjen dan lima Direktorat teknis, yaitu Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Direktorat Perbenihan Tananam Hutan, Direktorat Rehabilitasi Hutan, Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove. Dalam pelaksanaan teknis di lapangan, Ditjen PDASRH memiliki Unit Pelaksana Teknis, yang terdiri dari 34 satker Balai Pengelolaan DAS dan Rehabilitasi Hutan (BPDASRH) dan 2 satker Balai Perbenihan Tanaman Hutan (BPTH).

Menata anggaran dan merancang perubahan

Pada Renstra Direktorat Jenderal PDASRH Revisi tahun 2020-2024, Ditjen PDASRH mengampu tiga program yang dilaksanakan oleh Kementerian LHK, yaitu Program Dukungan Manajemen, Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Kualitas Lingkungan Hidup. Masing-masing unit kerja eselon II mengampu program tersebut dengan pembagian tugas sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dilaksanakan oleh Sekretariat Ditjen PDASRH;
- 2) Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dilaksanakan oleh Direktorat Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan DAS, Direktorat Perbenihan Tananam Hutan, Direktorat Rehabilitasi Hutan, Direktorat Konservasi Tanah dan Air, Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove; dan
- 3) Program Kualitas Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Direktorat Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove.

Dalam rangka menghadapi tantangan fiskal, pemerintah telah melakukan reformasi fiskal, antara lain dengan peningkatan pendapatan, spending better, dan pembiayaan inovatif dan berkelanjutan. Sehingga langkah-langkah perbaikan untuk menata anggaran yang dilakukan adalah:

- 1) Menata sasaran yang beorientasi pada perbaikan tapak dan mengatur proses bisnis pemenuhan sasaran antar unit kerja;
- 2) Mendefinisikan sasaran kerja sebagai hasil kerja unit di bawahnya;
- 3) Internalisasi sasaran kerja ke dalam perencanaan dan penganggaran; dan
- 4) Memantau dan evaluasi kinerja pada tingkat outcome dan dampak

Mempermudah regulasi

Dengan adanya undang-undang Nomor 11 tahun 2021 tentang cipta kerja, maka pemerintah menurunkan pada peraturan pemerintah Nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, peraturan pemerintah Nomor 23 tahun 2021 tentang penyelenggaraan kehutanan dan peraturan pemerintah Nomor 24 tahun 2021 tentang tata cara sanksi administrasi dan tata cara PNBP dari denda administrasi bidang kehutanan.

KLHK telah mengesahkan peraturan menteri sebagai turunan undang-undang cipta kerja dan peraturan pemerintah turunannya. Kegiatan lingkup Ditjen PDASRH yang berdampak adalah pengembangan perbenihan tanaman hutan, dimana diatur tentang kegiatan usaha pengadaan dan pengedaran benih sebagaimana tertuang pada PermenLHK Nomor 3 tahun 2021.

Peta Sasaran Kinerja Ditjen PDASRH Tahun 2020-2024

Sesuai arsitektur kinerja pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi), Kementerian LHK memiliki 4 (empat) Tujuan yang akan dicapai melalui 13 (tiga belas) Sasaran Strategis yang diukur keberhasilannya dengan 13 (tiga belas) Indikator Kinerja Utama.

Berikut Peta Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan (*cascading*) untuk menggambarkan struktur keselarasan kinerja dalam rangka mencapai Sasaran Strategis KLHK, Sasaran Program Ditjen PDASRH serta Sasaran Kegiatan Unit Kerja Eselon II yang dinilai tepat untuk dilakukan pencapaian kinerja.

Peta sasaran Program Ditjen PDASRH

KODE DAN SASARAN PROGRAM (OUTCOME)	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/IOP	KODE DAN SASARAN DITJEN PDASRH	INDIKATOR KINERJA DITJEN PDASRH	SATUAN	TARGET				
					2020	2021	2022	2023	2024
Program Kualitas Lingkungan Hidup									
T1.S1 Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	T1.S1.1 Indeks kualitas lingkungan hidup (IKLH)	T1.S1.1.12 Meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional	T1.S1.1.12.1 Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	15	15	15
Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan									
T1.S4 Menurunnya laju penyusutan hutan	T1.S4.1 Laju Deforestasi dan Degradasi Hutan	T1.S4.1.3 Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai	T1.S4.1.3.1 Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi	Hektar	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000
Program Dukungan Manajemen									
T4.S2 Meningkatnya birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien	T4.S2.1 Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi	T4.S2.1.1 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KLHK	T4.S2.1.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Poin	75	77	78	79	80

Berdasarkan optimalisasi kinerja dalam Rencana Stategis KLHK Tahun 2020-2024 (revisi), program kualitas lingkungan hidup dan pengelolaan hutan berkelanjutan yang dilaksanakan Ditjen PDASRH mendukung pilar pembangunan dengan tujuan "Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim". Sedangkan program dukungan manajemen mendukung pilar Tata Kelola dengan tujuan "Tata Kelola pemerintahan Bidang LHK yang akuntabel, responsif dan berpelayanan prima".

Peta sasaran Kegiatan Ditjen PDASRH

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKU/IKP/IKK)	TARGET REVISI					
			Satuan	2020	2021	2022	2023	2024
PROGRAM 029.WA : DUKUNGAN MANAJEMEN								
KEGIATAN 5403 : DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA DITJEN PDASRH								
	T4.S2.1.1.1.3.3 Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	T4.S2.1.1.1.3.1 Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Poin	75	77	78	79	80
		T4.S2.1.1.1.3.2 Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Level	3	3	3	4	4
		T4.S2.1.1.1.3.3 Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel	Dokumen	1	1	1	1	1
PROGRAM 029.FF : PENGELOLAAN HUTAN BERKELANJUTAN								
KEGIATAN 6734 : KONSERVASI TANAH DAN AIR								
	T1.S4.1.3.1.1 Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	T1.S4.1.3.1.2.1 Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	Hektar	15.434	14.566	15.000	15.000	15.000
	T1.S4.1.3.1.2 Menurunnya sedimentasi dalam DAS	T1.S4.1.3.1.2.1 Jumlah bangunan konservasi tanah dan air	Unit	3.242	1.582	3.000	7.588	7.588
KEGIATAN 6735 : PERENCANAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI								
	T1.S4.1.3.1.3 Tersedianya informasi baseline DAS	T1.S4.1.3.1.3.1 Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time	DAS	108	108	108	108	108
		T1.S4.1.3.1.3.2 Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	Lembaga /forum	34	34	34	34	34
KEGIATAN 6736 : REHABILITASI HUTAN								
	T1.S4.1.3.1.4 Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	T1.S4.1.3.1.4.1 Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	Hektar	112.973	197.027	230.000	230.000	230.000
		T1.S4.1.3.1.4.2 Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	Hektar	-	-	1.500	3.000	3.000
KEGIATAN 6737 : REHABILITASI MANGROVE								
	T1.S4.1.3.1.5 Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	T1.S4.1.3.1.5.1 Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	Hektar	18.709	1.250	1.250	1.250	1.250
		T1.S4.1.3.1.5.2 Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya	Lembaga /forum	34	34	34	34	34
KEGIATAN 5607 : PENGEMBANGAN PERBENIHAN TANAMAN HUTAN								
	T1.S4.1.3.1.6 Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	T1.S4.1.3.1.6.1 Luas sumber benih unggul yang dibangun	Hektar	10	55	100	120	125
		T1.S4.1.3.1.6.2 Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	Batang	28.524.060	38.916.939	67.500.000	67.500.000	67.500.000
		T1.S4.1.3.1.6.3 Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	Butir	31.761.533	40.000.000	65.000.000	65.000.000	65.000.000
PROGRAM 029.FD : KUALITAS LINGKUNGAN HIDUP								
KEGIATAN 6738 : REHABILITASI PERAIRAN DARAT								
	T1.S1.1.12.1.1 Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	T1.S1.1.12.1.1.1 Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya	Mata Air	91	59	50	150	150
		T1.S1.1.12.1.1.2 Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	15	15	15
		T1.S1.1.12.1.1.3 Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	Unit	11	260	470	470	489

Pengarusutamaan

Pengarusutamaan (*mainstreaming*) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pembangunan inovatif dan adaptif, sehingga dapat menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Rensta) KLHK 2020-2024 terdapat 4 (empat) pengarusutamaan, dimana antara satu pengarusutamaan dengan yang lainnya saling terkait dan saling mendukung, penjabaran pengarusutamaan didalam lingkup Ditjen PDASRH adalah sebagai berikut:

PENGARUSUTAMAAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

merupakan pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan yang mencakup tiga dimensi yakni sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan dan pengelolaan hutan dan lahan berbasis DAS secara berkelanjutan untuk menunjang kesejahteraan masyarakat menjadi visi Ditjen PDASRH. Sehingga kebijakan dan strategi pengelolaan DAS dan Hutan Lindung mengedepankan prinsip kelestarian.



PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG)

merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Arah Kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, di lingkup Ditjen PDASRH diupayakan melalui: (1) akses yang setara terhadap sumberdaya; (2) partisipasi aktif dalam pengelolaan DAS dan hutan lindung, (3) penyediaan sarana dan prasarana yang responsif gender, (4) penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, dan (5) pengembangan inovasi dalam rangka mempermudah pelaksanaan PUG.



PENGARUSUTAMAAN MODAL SOSIAL DAN BUDAYA

merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (*local knowledge*), kearifan lokal (*local wisdom*), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya diarahkan dalam perencanaan pembangunan bidang PDASRH dengan pelibatan masyarakat dengan kearifan dan pengetahuan lokalnya.



PENGARUSUTAMAAN TRANSFORMASI DIGITAL

merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Pengarusutamaan transformasi digital diimplementasikan dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi, serta pelayanan terhadap publik.



C. Rencana Kerja Ditjen PDASRH Tahun 2022

Tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022 ialah “Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural”. Tahun 2022 diharapkan menjadi tahun pertama untuk Indonesia mulai lepas dari tekanan COVID-19 sehingga tahun 2022 merupakan Tahun Kunci Pemantapan Pemulihan Ekonomi Nasional. Namun demikian tantangan Indonesia tidak saja Pemulihan Ekonomi Nasional, namun juga Transformasi Ekonomi dalam jangka menengah dan panjang yang harus dilakukan dari sekarang.

Ditjen PDASRH menyelaraskan pemulihan ekonomi nasional dan reformasi struktural dalam pelaksanaan kegiatan dan tata kelola pemerintahan internal Ditjen PDASRH. Perencanaan kegiatan dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional menjadi peran penting Ditjen PDASRH dalam mendukung tema rencana kerja KLHK. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Ditjen PDASRH selama ini bersifat padat karya dalam upaya mendukung pemulihan ekonomi nasional melalui kegiatan pemulihan fungsi hutan dan lahan,

Dalam pencapaian target IKU Kementerian LHK, Ditjen PDASRH telah menyusun Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program serta target yang akan dilaksanakan di tahun 2022. Program, Sasaran Program, Indikator Kinerja Program dan Target pada Renja Ditjen PDASRH Tahun 2022 sebagai berikut.

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target 2022	Satuan
Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya Pengelolaan Danau Prioritas Nasional	Jumlah danau prioritas nasional yang dikendalikan kerusakannya	15	Danau
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Meningkatnya tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai	Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi	230.000	Ha
Dukungan Manajemen	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Bidang LHK Yang Akuntabel, Responsif Dan Berpelayanan Prima	Nilai Sakip Ditjen Pengendalian Das Dan Rehabitasi Hutan	78	Poin

Dalam rangka pencapaian Indikator Kinerja Ditjen PDASRH sebagaimana tersebut diatas, maka disusun Kegiatan, Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan yang dilaksanakan oleh eselon II lingkup Ditjen PDASRH.

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKU/IKP/ IKK)	Target 2022	Satuan
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASRH	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	78	Poin
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	3	Level
			Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel	1	Dokumen
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Konservasi Tanah dan Air	Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan Menurunnya sedimentasi dalam DAS	Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	15.000	Hektar
			Jumlah bangunan konservasi tanah dan air	3.000	Unit
	Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Tersedianya informasi baseline DAS	Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time	108	DAS
			Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	34	Lembaga /forum
	Rehabilitasi Hutan	Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	35.000	Hektar
			Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	1.500	Hektar
	Rehabilitasi Mangrove	Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	1.250	Hektar
			Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya	34	Lembaga /forum
	Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	Luas sumber benih unggul yang dibangun	100	Hektar
			Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	42.500.000	Batang
			Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	40.000.000	Butir
Kualitas Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Perairan Darat	Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya	50	Mata Air
			Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	15	Danau
			Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	170	Unit

Dalam RKP Tahun 2022, Ditjen PDASRH mendukung 3 dari 4 Agenda Prioritas/Prioritas Nasional yang di ampu oleh KLHK, yaitu :

1. PN 1 : memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan
2. PN 2 : mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan
3. PN 6 : membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim.

Kontribusi kegiatan Ditjen PDASRH dalam mendukung pembangunan nasional secara lebih rinci dilihat dari Rincian Output (RO) yang dilaksanakan sebagai berikut.

PRIORITAS NASIONAL	RINCIAN OUTPUT	TARGET 2022	SATUAN
PN 1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	15	Danau
	Jumlah segmen sungai yang dikendalikan kerusakannya	15	Unit
	Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	170	Unit
	Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya	50	Mata Air
PN 2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	1.500	Hektar
PN 6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	35.000	Hektar
	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air	3.000	Unit
	Luas sumber benih unggul yang dibangun	100	Hektar
	Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	42.500.000	Batang
	Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	40.000.000	Butir
	Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	1.250	Hektar
	Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya	34	Lembaga /forum
	Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	34	Lembaga /forum

D. Perjanjian Kinerja Ditjen PDASRH Tahun 2022

Untuk menjamin terlaksananya program pembangunan bidang PDASRH tahun 2022, telah disepakati target-target kinerja program melalui perjanjian kinerja antara Direktur Jenderal PDASRH dengan Menteri LHK. Selanjutnya untuk menjamin terlaksananya kinerja program PDASRH maka di level bawahnya juga ditetapkan target kinerja kegiatan yaitu para pejabat eselon II dan pimpinan Satker lingkup Ditjen PDASRH dengan Direktur Jenderal PDASRH.

Pagu anggaran awal Ditjen PDASRH TA 2022 ditetapkan sebesar Rp.1.742.353.294.000,-. Namun demikian pada perjalanannya terjadi perubahan pagu anggaran. Adanya implementasi kebijakan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga (K/L), pemenuhan kebutuhan prioritas dan mendesak di akhir tahun serta adanya realokasi anggaran, menyebabkan penurunan pagu anggaran Ditjen PDASRH TA 2022 menjadi sebesar Rp.1.550.432.646.000,-.

Konsekuensi dari adanya perubahan/penurunan pagu Ditjen PDASRH di tahun 2022, adalah terjadinya perubahan dan penyesuaian target kinerja untuk pelaksanaan pembangunan bidang PDASRH, baik pada kinerja program, kegiatan maupun output.

Target Kinerja Program

Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
		Semula	Menjadi
Pulihnya kondisi lahan dalam DAS	Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS	8,08 %	8,08 %
Meningkatnya luas penutupan vegetasi	Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi	35.000 Ha	30.850 Ha
Meningkatnya kualitas pada perairan darat	Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	15 Danau	15 Danau
Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PDASRH	78 Poin	78 Poin

Target Kinerja Kegiatan

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR (IKU/IKP/ IKK)	Target		Satuan
				Semula	Menjadi	
Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASRH	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	78	78	Poin
			Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	3	3	Level
			Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel	1	1	Dokumen
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Konservasi Tanah dan Air	Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	15.000	15.000	Hektar
			Menurunnya sedimentasi dalam DAS	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air	3.000	2.760
	Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Tersedianya informasi baseline DAS	Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time	108	108	DAS
			Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	34	34	Lembaga/forum
	Rehabilitasi Hutan	Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	35.000	30.850	Hektar
			Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	1.500	1.500	Hektar
	Rehabilitasi Mangrove	Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	1.250	1.100	Hektar
			Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya	34	34	Lembaga/forum
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan		Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	Luas sumber benih unggul yang dibangun	100	85	Hektar
			Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	42.500.000	62.680.916	Batang
			Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	40.000.000	39.000.000	Butir
Kualitas Lingkungan Hidup	Rehabilitasi Perairan Darat	Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya	50	50	Mata Air
			Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	15	15	Danau
			Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	170	1.064	Unit

Keterangan : Perubahan target jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif termasuk target produksi persemaian skala besar.



03

AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Kinerja Organisasi Ditjen PDASHL
- B. Capaian Kinerja Program
- C. Capaian Kinerja Kegiatan
- D. Capaian Kinerja Prioritas Nasional
- E. Realisasi Anggaran



Salah satu fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi output dan outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara kinerja yang seharusnya terjadi dengan kinerja yang diharapkan dan dilakukan secara berkala dan tahunan. Hasil dari pengukuran kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja sasaran/*outcome*.

Untuk menghindari bias yang terlalu besar/lebar terhadap persentase capaian kinerja, maka capaian setiap indikator kinerja ditetapkan maksimum 150%. Terhadap hasil pengukuran kinerja dilakukan evaluasi pencapaian pada setiap indikator kinerja. Evaluasi ini adalah untuk mengungkap setiap angka/persentase capaian kinerja sehingga dapat memberikan gambaran sebenarnya mengenai kegiatan dan program yang dilaksanakan. Selain itu, evaluasi dilakukan untuk melihat perbedaan capaian kinerja dengan rencana/target kinerja (*performance gap*) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadinya gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilakukan. Berdasarkan hasil evaluasi dapat dilakukan analisis akuntabilitas kinerja lebih lanjut, seperti keterkaitan kinerja dengan kebijakan dalam mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran, outcome, output serta indikator-indikator kinerja. Hasil analisis dapat digunakan untuk menentukan rencana kinerja pada tahun berikutnya. Capaian kinerja serta analisis capaian kinerja yang akan disampaikan dalam laporan kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) yang telah ditetapkan dengan mengacu dengan anggaran yang tersedia.

Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi pengukuran kinerja sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian Rencana Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi} - (\text{Rencana} - \text{Realisasi})}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

A. Capaian Kinerja Organisasi Ditjen PDASRH




Pengukuran capaian kinerja Ditjen PDASRH pada 3 (tiga) program yang dilaksanakan di tahun 2022 dihitung dari capaian indikator kinerja program (IKP) yang mendukung masing-masing capaian sasaran program. Mengacu pada perjanjian kinerja tahun 2022, maka kinerja Ditjen PDASRH dihasilkan dari rata-rata capaian kinerja 4 (empat) IKP yang mendukung 4 (empat) sasaran program.

Dengan perhitungan kinerja yang dilakukan dapat diketahui bahwa sebanyak 1 (satu) IKP yang mendukung sasaran program memiliki capaian kinerja lebih dari 100% yaitu indikator menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS, sebanyak 1 (satu) IKP dengan capaian kinerja 100% dan sebanyak 2 (satu) IKP yang capaian kinerjanya kurang dari 100%. Namun demikian secara keseluruhan rata-rata nilai kinerja Ditjen PDASRH pada tahun 2022 adalah sebesar **100,86%**.

Program	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Persentase
Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pulihnya kondisi lahan dalam DAS	Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS	%	8,08	9,06	112,13
	Meningkatnya luas penutupan vegetasi	Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi	Ha	30.850	30.712	99,55
Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas pada perairan darat	Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	Danau	15	15	100,00
Dukungan Manajemen	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PDASRH	Poin	78	71,58	91,77
					Rata-rata	100,86

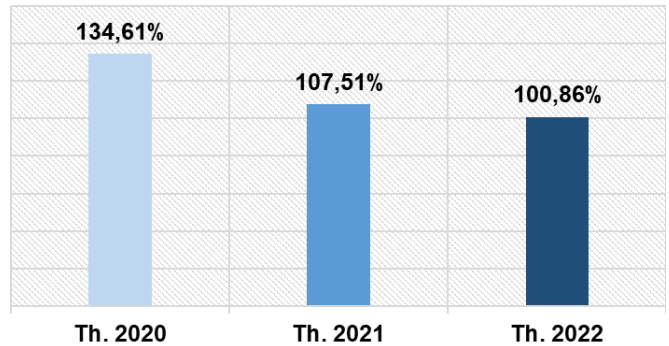
Jika dilihat dari rata-rata capaian indikator kinerja program yang dilaksanakan pada tahun 2022, maka capaian kinerja program pengelolaan hutan berkelanjutan memiliki capaian kinerja tertinggi yaitu sebesar 105,84 % jika dibandingkan dengan dua capaian kinerja program lainnya yaitu kualitas lingkungan hidup maupun program dukungan manajemen.



-  Program pengelolaan hutan berkelanjutan
-  Program kualitas lingkungan hidup
-  Program dukungan manajemen



Kinerja Ditjen PDASRH tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan kinerja tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan efektifitas kinerja tahun 2022 juga lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun 2021 atau tahun 2020. Namun demikian kinerja Ditjen PDASRH tahun 2022 masih masuk kategori sangat baik karena rata-rata capaian sasaran programnya masih lebih dari 100%.



Efektifitas Kinerja Tahun 2022

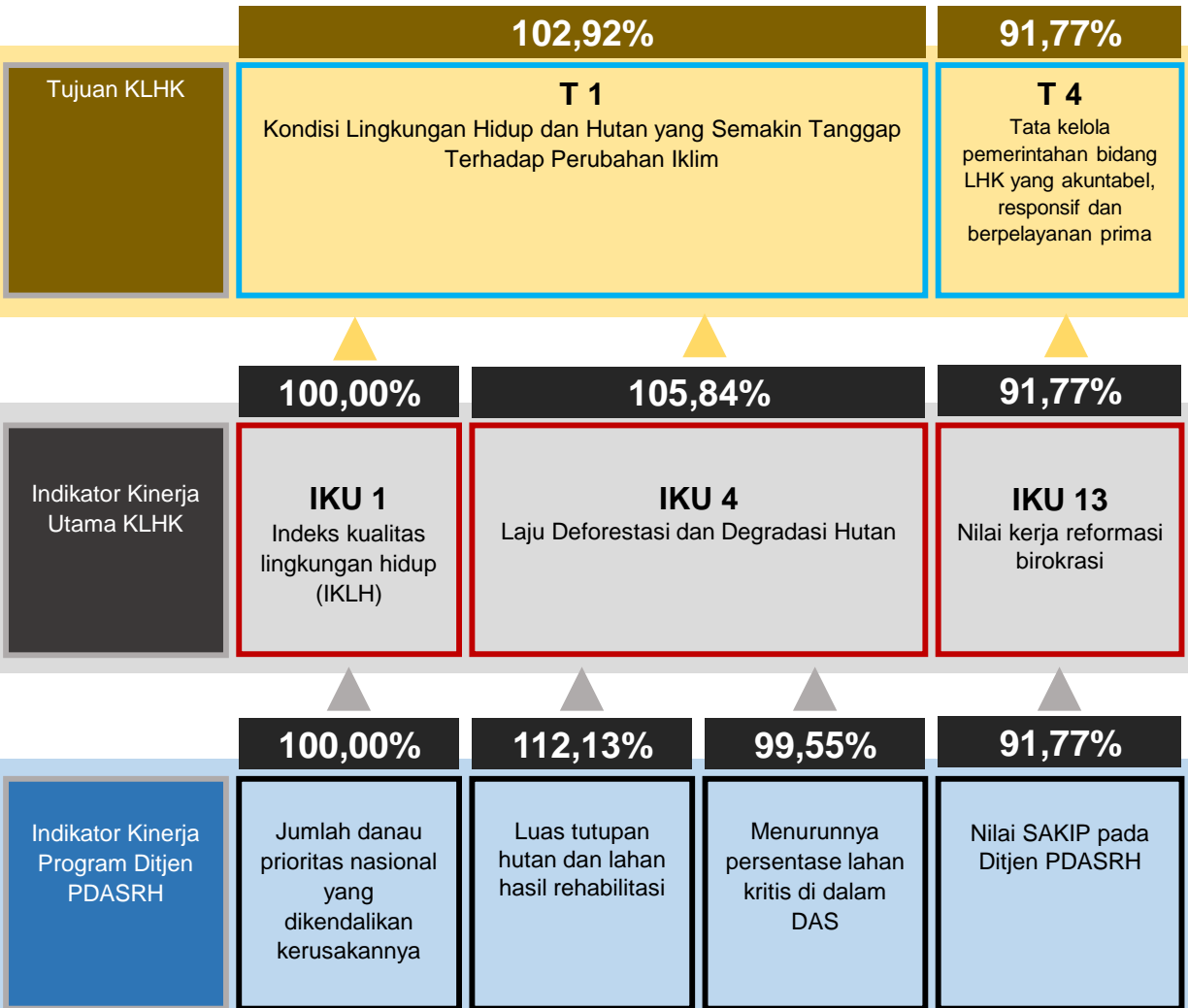
Dalam pencapaian kinerja organisasi tentu saja tidak lepas dari dukungan sumber daya yang tersedia. Dalam mewujudkan kinerja yang ingin dicapai, Ditjen PDASRH mendapatkan alokasi pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp.1.550.432.646.000,- dan terealisasi sebesar 96,15% atau sebesar Rp.1.490.772.672.073,-.

Dengan membandingkan kinerja fisik terhadap kinerja keuangan, maka nilai efisiensi Ditjen PDASRH tahun 2022 adalah sebesar 1,05. Berdasarkan nilai tersebut maka kinerja Ditjen PDASRH tahun 2022 termasuk ke dalam katagori efisien.

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

	Target	Realisasi	%
Input	Rp.1.550.432.646.000	Rp.1.490.772.672.073	96,15
Output	100 %	100,86 %	100,86
Nilai Efisiensi			1,05
Kategori			Efisien

Sesuai arsitektur kinerja pada Renstra Kementerian LHK 2020-2024 (Revisi), tentu saja dengan capaian kinerja program Ditjen PDASRH tahun 2022 memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan, sasaran strategis dan indikator kinerja utama di level Kementerian LHK. Kontribusi Ditjen PDASRH dalam pencapaian IKU dan tujuan sebagai berikut.



Dukungan Ditjen PDASRH tahun 2022 terbesar ditunjukkan pada pencapaian IKU 4 yaitu laju deforestasi dan degradasi hutan dan tujuan 1 Kondisi Lingkungan Hidup dan Hutan yang Semakin Tanggap Terhadap Perubahan Iklim.

84.500 orang

Jumlah masyarakat yang terlibat dalam kegiatan padat karya

Sesuai dengan uraian visi Ditjen PDASRH maka seluruh waktu, tenaga dan biaya sebagian besar diarahkan dalam usaha pemulihan lahan kritis berbasis masyarakat untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat. Hampir seluruh kegiatan Ditjen PDASRH tahun 2022 masuk dalam program padat karya yang secara langsung dapat meningkatkan pendapatan atau kesejahteraan masyarakat.

2,4 Juta HOK

243 Miliar



No	Kegiatan	Aliran Dana ke Masyarakat	Jumlah Orang Terlibat	Hari Orang Kerja
1	Penanaman RHL	80.108.320.300	12.287	766.250
2	Pemeliharaan RHL	63.198.970.654	28.891	657.860
3	Kebun Bibit Rakyat	38.338.243.000	19.893	389.483
4	Kebun Bibit Desa	4.462.195.000	2.538	35.912
5	Pembangunan Dam Penahan	5.780.579.395	3.879	59.729
6	Pembangunan Gully Plug	2.800.425.156	3.460	27.850
7	Bibit Berkualitas	39.297.427.000	10.155	389.193
8	Rehabilitasi mangrove	5.641.122.000	1.083	58.597
9	Pemeliharaan mangrove	2.734.125.000	1.669	22.715
10	Instalasi Pemanenan Air Hujan	202.103.029	245	2.032
11	Sumur Resapan Air	329.005.977	286	2.170
12	Ekohidrolika	183.705.810	114	1.674
Jumlah		243.076.222.321	84.500	2.413.465

B. Capaian Kinerja Program

IKP :

Menurunnya Persentase Lahan Kritis di dalam DAS

Luas lahan dalam daerah aliran sungai (DAS) yang dipulihkan kondisinya yaitu luas lahan dalam DAS baik itu di dalam dan di luar kawasan hutan yang dipulihkan kondisinya melalui kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) secara vegetatif dan sipil teknis.

Entitas yang diukur adalah kondisi lahan dalam DAS yang meliputi persentase luas lahan kritis, persentase penutupan vegetasi, indeks erosi (IE) atau nilai tertimbang pengelolaan tanaman dan lahan (Factor CP). Persentase luas lahan kritis dipengaruhi oleh penutupan lahan, kemiringan lereng, tingkat bahaya erosi, produktivitas lahan dan manajemen (kegiatan pengelolaan). Dengan adanya kegiatan RHL, maka akan berpengaruh dalam peningkatan penutupan lahan, penurunan tingkat bahaya erosi dan timbulnya kegiatan pengelolaan hutan dan lahan, sehingga menurunkan luas lahan kritis yang berakibat menurunnya persentase luas lahan kritis.

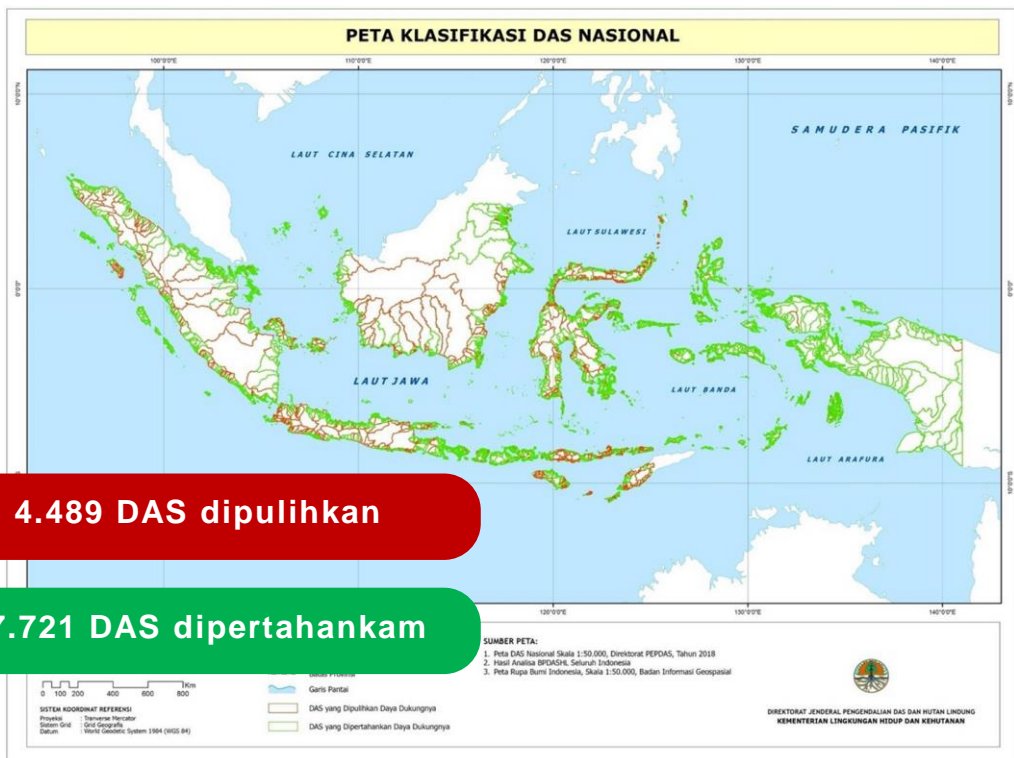
Dalam hal pemulihan kondisi lahan tentu saja tidak terbatas pada intervensi fisik semata. Berbagai kegiatan lain juga memberikan sumbangsih terhadap pemulihan kondisi lahan meskipun secara langsung tidak masuk dalam formulasi perhitungan. Beberapa intervensi yang telah berhasil dilakukan pada tahun 2022 dalam upaya pemulihan kondisi lahan antara lain melalui rehabilitasi hutan, perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS, serta konservasi tanah dan air.

Kegiatan rehabilitasi hutan yang berhasil dilakukan di tahun 2022 baik yang dilakukan oleh Ditjen PDASRH dengan sumber dana APBN maupun pihak-pihak lain yang bersumber dari dana non APBN, secara keseluruhan adalah seluas 257.895 Ha.

Kegiatan perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS DAS yang mendukung menurunnya persentase lahan kritis antara lain yaitu (1) pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung SIDAS secara *realtime* yaitu pengembangan sistem informasi pengelolaan DAS, revitalisasi alat monitoring SPAS, AWS dan sistim peringatan dini longsor, peningkatan kapasitas pengamat SPAS, monitoring sebaran banjir, penyusunan Rencana Umum RHL, pengembangan media sosial.

(2) Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS, yaitu identifikasi peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS, pengembangan kelembagaan daerah/nasional, dan koordinasi multipihak dalam mendukung indikasi program.

Peningkatan pemahaman terhadap wilayah DAS dan sistem pengelolaan DAS dapat dibantu dengan membangun sebuah Sistem Informasi DAS Indonesia (SIMDAS). Keberadaan SIMDAS dapat membantu fungsi PDASRH dalam koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pengelolaan DAS khususnya dalam mendukung pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi hutan, rehabilitasi lahan serta konservasi tanah dan air. Sedangkan peningkatan kapasitas kelembagaan pengelolaan DAS merupakan aspek yang penting dalam pengelolaan DAS dan perlu mendapat perhatian berbagai *stakeholder* untuk saling memahami dan menyamakan persepsi tentang pengelolaan DAS. Kegiatan *sharing* praktik baik dari berbagai forum DAS daerah dan Forum DAS tingkat nasional diharapkan dapat diaplikasikan, diterapkan dan dimodifikasi untuk dapat dilakukan di daerah.



Prioritas Penanganan lahan kritis tahun 2020-2024 di 108 DAS dipulihkan

Pada tahun 2022 Ditjen PDASRH telah melakukan update Peta Lahan Kritis Nasional. Peta lahan kritis tersebut juga telah disahkan melalui SK Direktur Jenderal PDASRH Nomor: SK.49/PDASRH/PPPDAS/ DAS.0/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penetapan Peta dan Data Lahan Kritis Nasional Tahun 2022. Penyusunan Peta Lahan Kritis mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal PDASHL Nomor P.3/PDASHL/SET/KUM.1/7/2018 yang memperhitungkan pengaruh erosi, lereng lahan, dan penutupan lahan. Dari peta yang telah disusun tersebut diperoleh informasi bahwa secara nasional terdapat sekitar 12.744.925 Ha berada dalam kondisi kritis baik di dalam maupun di luar kawasan huta.

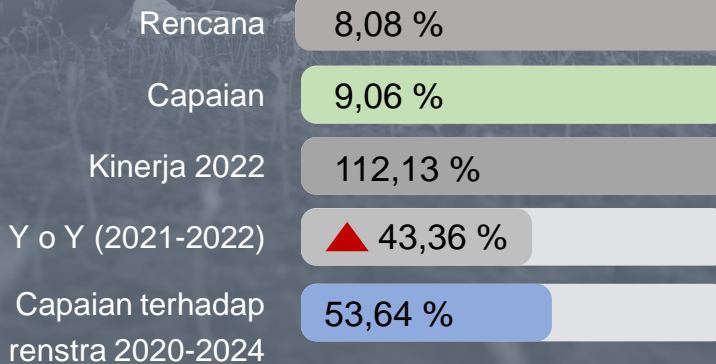
Intervensi penurunan lahan kritis pada 108 DAS prioritas melalui kegiatan perencanaan dan pengawasan pengelolaan DAS

No	BPDAS	DAS Prioritas	Kegiatan
1	Sei Jang Duriangkang	Duriangkang	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, RPDAS, SIPDAS
2	Sei Jang Duriangkang	Jago	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, RPDAS, SIPDAS
3	Sei Jang Duriangkang	Pulai	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, RPDAS, SIPDAS
4	Sei Jang Duriangkang	Sei Gong	Updating Lahan Kritis, RPDAS, SIPDAS
5	Kahayan	Kapuas - Murung	Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
6	Kahayan	Kahayan	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
7	Kahayan	Seruyan	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
8	Palu Poso	Laa	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
9	Palu Poso	Palu	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
10	Palu Poso	Poso	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
11	Krueng Aceh	Krueng Tripa	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
12	Krueng Aceh	Peusangan	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
13	Krueng Aceh	Krueng Meureubo	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
14	Wampu Sei Ular	Belawan	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, RPDAS, SIPDAS
15	Wampu Sei Ular	Percut	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
16	Wampu Sei Ular	Babalan	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
17	Asahan Barumon	Asahan Toba	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
18	Asahan Barumon	Batang Gadis	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
19	Asahan Barumon	Batang Toru	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
20	Indragiri Rokan	Kampar	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS, Impact Assesment
21	Indragiri Rokan	Rokan	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS, Impact Assesment
22	Indragiri Rokan	Siak	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS, Impact Assesment
23	Batanghari	Batanghari	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, RPDAS, Alat Pemantau Klimatologi, Monev PDAS, Impact Assesment
24	Batanghari	Pengabuan	Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
25	Batanghari	Air Hitam	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
26	Musi	Musi	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS, Impact Assesment
27	Musi	Lalan	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
28	Musi	Lumpur	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
29	Ketahun	Bengkulu	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
30	Ketahun	Lemau	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
31	Ketahun	Bangkenang	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
32	Way Seputih Sekampung	Tulang Bawang	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
33	Way Seputih Sekampung	Sekampung	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
34	Baturusa Cerucuk	Linggang	Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
35	Baturusa Cerucuk	Bangka Kota	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, RPDAS, SIPDAS
36	Baturusa Cerucuk	Cerucuk	Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
37	Agam Kuantan	Indrapura	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
38	Agam Kuantan	Masang Kiri	Updating Lahan Kritis, Impact Assesment, SIPDAS
39	Agam Kuantan	Anai	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
40	Tondano	Dumoga Mongondow	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
41	Tondano	Ranoyapo	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
42	Tondano	Talawaan	Updating Lahan Kritis, Monev PDAS, SIPDAS
43	Bone Bolango	Limboto	Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
44	Bone Bolango	Atinggola	Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
45	Bone Bolango	Lemito	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, RPDAS, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS

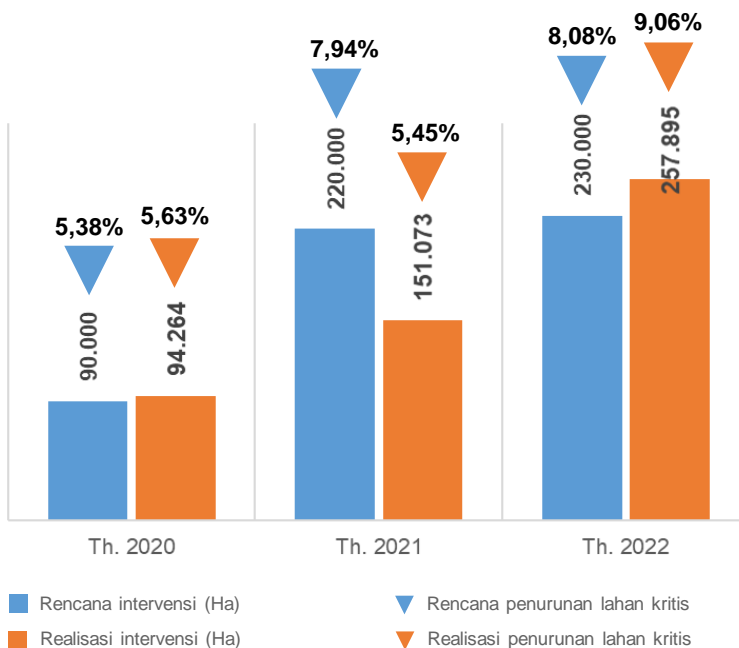
No	BPDAS	DAS Prioritas	Kegiatan
46	Lariang Mamasa	Karama	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
47	Lariang Mamasa	Mapilli	Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS, Impact Assesment
48	Lariang Mamasa	Mandar	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
49	Jeneberang Saddang	Bila Walanae	Updating Lahan Kritis, SIPDAS, Impact Assesment
50	Jeneberang Saddang	Saddang	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
51	Jeneberang Saddang	Jeneberang	Updating Lahan Kritis, SIPDAS, Impact Assesment
52	Jeneberang Saddang	Larona Malili	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, RPDAS, SIPDAS
53	Sampara	Konawehea	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
54	Sampara	Lasolo	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
55	Sampara	Roraya	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
56	Memberamo	Murpurka	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
57	Memberamo	Sentani Tami	Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
58	Remu Ransiki	Kais	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
59	Remu Ransiki	Klawoguk	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
60	Remu Ransiki	Remu	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
61	Ake Malamo	Ake Jodoh	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
62	Ake Malamo	Ake Kobe	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
63	Ake Malamo	Ake Tiabo	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
64	Ake Malamo	Ake Lamo	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
65	Waehapu Batu Merah	Wae Samal	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
66	Waehapu Batu Merah	Wae Eti	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
67	Waehapu Batu Merah	Wae Lola Besar	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
68	Kapuas	Kapuas	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
69	Kapuas	Pawan	Updating Lahan Kritis, RPDAS, SIPDAS
70	Kapuas	Sambas	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
71	Kapuas	Mempawah	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
72	Barito	Cantung	Updating Lahan Kritis
73	Barito	Satui	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, RPDAS, SIPDAS
74	Barito	Barito	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
75	Mahakam Berau	Mahakam	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
76	Mahakam Berau	Kendilo	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
77	Mahakam Berau	Tunan	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
78	Citarum Ciliwung	Citarum	Updating Lahan Kritis, Impact Assesment, SIPDAS
79	Citarum Ciliwung	Ciujung	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
80	Citarum Ciliwung	Cimandiri	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
81	Citarum Ciliwung	Cisadane	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, Impact Assesment, SIPDAS
82	Cimanuk Citanduy	Citanduy	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
83	Cimanuk Citanduy	Cimanuk	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
84	Cimanuk Citanduy	Ciwulan	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
85	Pemali Jratun	Serang	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
86	Pemali Jratun	Pemali	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
87	Pemali Jratun	Tuntang	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
88	Pemali Jratun	Juwana	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
89	Serayu Opak Progo	Serayu	Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
90	Serayu Opak Progo	Progo	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
91	Serayu Opak Progo	Opak	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
92	Solo	Bengawan Solo	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
93	Solo	Grindulu	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
94	Solo	Pringombo	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
95	Solo	Baksoko	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
96	Brantas Sampean	Brantas	Updating Lahan Kritis, Impact Assesment, SIPDAS
97	Brantas Sampean	Sampean	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
98	Brantas Sampean	Mayang	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
99	Brantas Sampean	Blega	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
100	Unda Anyar	Unda	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
101	Unda Anyar	Balingkang	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
102	Unda Anyar	Daya Kubu	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
103	Dodokan Moyosari	Beh	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
104	Dodokan Moyosari	Nangagali	Karakteristik DAS/Baseline, Updating Lahan Kritis, SIPDAS
105	Dodokan Moyosari	Kelep	Updating Lahan Kritis, SIPDAS
106	Benain Noelmina	Benain	Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, Monev PDAS, SIPDAS
107	Benain Noelmina	Noelmina	Updating Lahan Kritis, Alat Pemantau Klimatologi, SIPDAS
108	Benain Noelmina	Kambaneru	Updating Lahan Kritis, SIPDAS

IKHTISAR KINERJA

Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS



Melalui upaya berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut, pada tahun 2022 telah berhasil menurunkan persentase lahan kritis sebesar 9,06 %. Sehingga capaian kinerjanya sebesar 112,13 %. Bahkan capaian kinerja tahun ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kinerja tahun 2021. dan jika diproyeksikan dengan pencapaian target Renstra 2020-2024, selama periode tiga tahun (2020-2022) telah berhasil menurunkan lahan kritis komulatif sebesar 20,15 % dari target penurunan lahan kritis total sebesar 37,56 %. Sehingga Ditjen PDASRH tetap optimis untuk pencapaian target kinerja selama lima tahun.



Persentase penurunan lahan kritis per Satker tahun 2022

NO	BPDAS	REALISASI RHL	% PENURUNAN LAHAN KRITIS
1	Krueng Aceh	3.852	0,14
2	Wampu Sei Ular	4.181	0,15
3	Asahan Barumun	16.635	0,58
4	Agam Kuantan	5.996	0,21
5	Batanghari	4.361	0,15
6	Indragiri Rokan	5.820	0,20
7	Sei Jang Duriangkang	2.060	0,07
8	Ketahun	5.238	0,18
9	Musi	14.239	0,50
10	Baturusa Cerucuk	2.874	0,10
11	Way Seputih Way Sekampung	11.338	0,40
12	Citarum Ciliwung	31.502	1,11
13	Cimanuk Citanduy	9.001	0,32
14	Pemali Jratun	6.269	0,22
15	Solo	4.077	0,14
16	Serayu Opak Progo	4.303	0,15
17	Brantas Sampean	8.623	0,30
18	Kapuas	5.146	0,18
19	Kahayan	5.486	0,19
20	Barito	8.275	0,29
21	Mahakam Berau	18.732	0,66
22	Tondano	6.848	0,24
23	Bone Bolango	4.859	0,17
24	Palu Poso	4.988	0,18
25	Karama	3.125	0,11
26	Jeneberang Saddang	13.191	0,46
27	Sampara	3.367	0,12
28	Unda Anyar	2.665	0,09
29	Dodokan Moyosari	12.901	0,45
30	Benain Noelmina	15.586	0,55
31	Waehapu Batu Merah	3.874	0,14
32	Ake Malamo	3.616	0,13
33	Remu Ransiki	1.550	0,05
34	Memberamo	3.319	0,12
Jumlah		257.895	9,06

Ket : penghitungan persentase lahan kritis hanya memperhitungkan rehabilitasi di ekosistem daratan, sehingga untuk rehabilitasi mangrove tidak diperhitungkan

Capaian kinerja tahun 2022 melebihi yang ditargetkan karena pada tahun ini ada dukungan intervensi rehabilitasi yang berasal dari sumber dana non APBN khususnya dari DAK yang cukup besar

Kegiatan konservasi tanah dan air yang mendukung menurunnya persentase lahan kritis yaitu berupa pembangunan bangunan konservasi tanah dan air. Sebanyak 2.985 Unit yang terdiri dari Dam Penahan sebanyak 983 Unit dan *Gully Plug* sebanyak 2.002 Unit telah terbangun pada tahun 2022.

Kegiatan RHL secara sipil teknis sangat bermanfaat untuk pengurangan erosi/sedimentasi terutama pada musim penghujan. Daya tampung sedimen tergantung pada ukuran Dam Penahan maupun *Gully Plug* yang dibuat. Sedangkan ukuran bangunan sipil teknis sangat ditentukan oleh panjang dan lebar alur.

Pembuatan bangunan sipil teknis, semata-mata tidak hanya mengurangi erosi/sedimentasi dalam upaya pengurangan lahan kritis dan pemulihan kondisi lahan dalam DAS, tetapi juga ada pemberdayaan masyarakat di dalam pelaksanaannya. Pengerjaan Dam Penahan dilaksanakan rata-rata oleh 7 (tujuh) orang selama 14 (empat belas) hari, sedangkan pengerjaan *Gully Plug* dilaksanakan rata-rata oleh 4 (empat) orang selama 7 (tujuh) hari.



Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa Dam Penahan



Bangunan Konservasi Tanah dan Air berupa Gully Plug



IKP :

Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi

Upaya pencapaian luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi dilakukan melalui rehabilitasi baik di dalam maupun di luar kawasan hutan. Rehabilitasi di dalam kawasan hutan biasa disebut dengan reboisasi, sedangkan rehabilitasi di luar kawasan hutan dilaksanakan dengan pembangunan hutan rakyat dan penghijauan lingkungan.

Sasaran rehabilitasi hutan dan lahan adalah lahan-lahan kritis DAS Prioritas pada semua hutan (kecuali cagar alam dan zona ini taman nasional) serta lahan, terutama pada bagian hulu DAS yang rawan bencana banjir, kekeringan dan tanah longsor, daerah tangkapan air (*catchment area*) dari waduk, bendungan dan danau, daerah resapan air (*recharge area*) di hulu DAS, daerah sempadan sungai, mata air, danau dan waduk serta bagian hilir DAS yang rawan bencana tsunami, intrusi air laut dan abrasi pantai.

Sesuai dengan perjanjian kinerja ada perubahan target untuk kegiatan rehabilitasi yang dilakukan, yaitu rehabilitasi di dalam kawasan dengan target awal 35.000 Ha berkurang menjadi 30.850 Ha. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari berkurangnya pagu anggaran di tahun 2022.

Luasan rehabilitasi yang berhasil dilakukan di tahun 2022 adalah seluas 30.712 Ha. Hal ini berarti capaian kinerja untuk IKP Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi tercapai sebesar 99,55 %.

Hambatan yang dihadapi di tingkat tapak dalam pelaksanaan rehabilitasi menyebabkan capaian kinerja tidak maksimal di beberapa wilayah kerja BPDAS. Permasalahan di wilayah kerja BPDAS Kapuas misalnya disebabkan oleh perubahan sikap masyarakat yang menolak dilakukan penanaman. Sementara permasalahan di wilayah kerja BPDAS Benain Noelmina lebih disebabkan karena perubahan masuknya musim penghujan atau adanya anomaly cuaca yaitu kombinasi fenomena La Nina dan *Indian Ocean Dipole* (IOD) negatif sampai dengan Januari 2023.

IKHTISAR KINERJA

IKP Luas tutupan hutan dan lahan hasil rehabilitasi

Rencana 30.850 Ha

Capaian 30.712 Ha

Kinerja 2021 99,55 %

Y o Y (2021-2022) ▼ 2,64 %

Capaian terhadap renstra 2020-2024 52,45 %

Luasan RHL Vegetatif (Ha)

NO	BPDAS	RENCANA	REALISASI
1	Krueng Aceh	877	889
2	Wampu Sei Ular	1.500	1.500
3	Asahan Barumun	1.550	1.550
4	Agam Kuantan	650	650
5	Batanghari	1.200	1.200
6	Indragiri Rokan	700	700
7	Sei Jang Duriangkang	330	330
8	Ketahun	1.000	1.000
9	Musi	1.500	1.500
10	Baturusa Cerucuk	490	490
11	Way Seputih Way Sekampung	1.250	1.600
12	Citarum Ciliwung	800	800
13	Cimanuk Citanduy	500	500
14	Pemali Jratun	500	500
15	Solo	300	300
16	Serayu Opak Progo	550	550
17	Brantas Sampean	750	750
18	Kapuas	840	790
19	Kahayan	950	950
20	Barito	1.100	1.100
21	Mahakam Berau	-	-
22	Tondano	950	950
23	Bone Bolango	1.300	1.300
24	Palu Poso	800	800
25	Karama	1.000	1.000
26	Jeneberang Saddang	1.893	1.893
27	Sampara	900	900
28	Unda Anyar	500	500
29	Dodokan Moyosari	1.500	1.500
30	Benain Noelmina	1.500	1.050
31	Waehapu Batu Merah	1.250	1.250
32	Ake Malamo	870	870
33	Remu Ransiki	500	500
34	Memberamo	550	550
	JUMLAH	30.850	30.712

Berbeda halnya dengan pencapaian target kinerja dalam Renstra untuk kegiatan rehabilitasi tahun 2022. Target rehabilitasi seluas 230.000 Ha dapat dipenuhi dari hasil rehabilitasi yang bersumber dari dana APBN maupun non APBN serta penanaman insentif dari fasilitasi penyediaan bibit.

Total realisasi penanaman yang berhasil dilakukan di tahun 2022 adalah seluas 259.106 Ha. Artinya jumlah realisasi penanaman kumulatif selama 3 (tiga) tahun (tahun 2020-2022) adalah seluas 524.533 Ha atau capaiannya sebesar 52,45 % terhadap target Renstra selama lima tahun (2020-2024). Dengan melihat capaian luas sampai dengan tahun ke tiga, maka pencapaian terhadap target Renstra masih optimis dapat tercapai untuk luasan 1.000.000 Ha.

Luasan RHL Vegetatif (Ha) Sumber Dana APBN dan Non APBN

NO	KEGIATAN	2020	2021	2022	JUMLAH
A	RHL APBN	96.985	139.720	222.931	459.636
1	DAS Prioritas/KPHL/HL	-	57.227	30.712	87.939
2	Mangrove	1.006	1.381	1.211	3.598
3	PKPM	17.704	-	-	17.704
4	Hutan Kota	-	-	-	-
5	RHL IKN	-	-	1.064	1.064
6	UPSA	-	-	50	50
7	Penanaman KBR	31.578	33.328	34.248	99.154
8	Penanaman bibit PP	22.880	37.689	103.406	163.974
9	Penanaman bibit PSB	-	-	37.880	37.880
10	Penanaman bibit produktif	5.126	5.932	7.924	18.982
11	Penanaman KBD	18.692	4.163	6.436	29.291
B	RHL NON APBN	15.988	12.734	36.175	64.897
1	Rehabilitasi DAS	15.434	11.838	18.498	45.771
2	Reklamasi	554	896	608	2.057
3	DAK	-	-	17.069	17.069
JUMLAH A + B		112.973	152.454	259.106	524.533

Sebaran Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha) Per Satker/UPT Tahun 2022

No	BPDAS	Sumber Dana APBN					Sumber Dana Non APBN			
		Mangrove	RHL Vegetatif	IKN	Penanaman Insentif	Penanaman UPSA	Rehabilitasi DAS	Reklamasi	Penanaman DAK	Jumlah
1	Krueng Aceh	75	889	-	2.963	-	-	-	-	3.927
2	Wampu Sei Ular	-	1.500	-	2.681	-	-	-	-	4.181
3	Asahan Barumun	-	1.550	-	15.045	40	-	-	-	16.635
4	Agam Kuantan	25	650	-	5.196	-	-	-	150	6.021
5	Batanghari	50	1.200	-	2.540	-	619	2	-	4.411
6	Indragiri Rokan	-	700	-	4.932	-	-	-	188	5.820
7	Sei Jang Duriangkang	-	330	-	1.730	-	-	-	-	2.060
8	Ketahun	-	1.000	-	4.238	-	-	-	-	5.238
9	Musi	50	1.500	-	4.200	-	2.273	16	-	8.039
10	Baturusa Cerucuk	-	490	-	2.384	-	-	-	-	2.874
11	Way Seputih Way Sekampung	25	1.600	-	9.343	-	-	-	395	11.363
12	Citarum Ciliwung	25	800	-	29.251	-	-	-	1.451	31.527
13	Cimanuk Citanduy	50	500	-	7.713	-	-	-	788	9.051
14	Pemali Jratun	50	500	-	5.284	-	-	-	485	6.319
15	Solo	-	300	-	3.752	-	-	-	25	4.077
16	Serayu Opak Progo	-	550	-	3.653	-	-	-	100	4.303
17	Brantas Sampean	76	750	-	6.912	-	-	-	961	8.699
18	Kapuas	-	790	-	4.346	10	-	-	-	5.146
19	Kahayan	100	950	-	4.454	-	77	5	-	5.586
20	Barito	-	1.100	-	5.341	-	1.513	321	-	8.275
21	Mahakam Berau	-	-	1.064	5.567	-	11.856	245	-	18.732
22	Tondano	50	950	-	4.216	-	-	7	1.675	6.898
23	Bone Bolango	75	1.300	-	2.454	-	-	-	1.105	4.934
24	Palu Poso	50	800	-	2.670	-	809	3	705	5.038
25	Karama	25	1.000	-	1.020	-	-	-	1.105	3.150
26	Jeneberang Saddang	75	1.893	-	5.597	-	-	-	450	8.015
27	Sampara	165	900	-	1.951	-	90	6	420	3.532
28	Unda Anyar	45	500	-	1.815	-	-	-	350	2.710
29	Dodokan Moyosari	100	1.500	-	6.796	-	63	-	4.542	13.001
30	Benain Noelmina	25	1.050	-	13.086	-	-	-	1.450	15.611
31	Waehapu Batu Merah	75	1.250	-	2.324	-	-	-	300	3.949
32	Ake Malamo	-	870	-	1.545	-	1.198	3	-	3.616
33	Remu Ransiki	-	500	-	1.050	-	-	-	-	1.550
34	Memberamo	-	550	-	2.344	-	-	-	425	3.319
35	BPTH Wilayah I	-	-	-	6.250	-	-	-	-	6.250
36	BPTH Wilayah II	-	-	-	5.251	-	-	-	-	5.251
JUMLAH		1.211	30.712	1.064	189.894	50	18.498	608	17.069	259.106

Keterangan :

Capaian realisasi penanaman insentif didukung dari penanaman penyediaan bibit produktif, bibit persemaian permanen, bibit persemaian skala besar, Kebun Bibit Rakyat serta Kebun Bibit Desa.



UPSA

Unit Pelestarian Sumberdaya Alam

Potret keberhasilan penanaman UPSA oleh KT Lebo Maluku seluas 10 Ha dengan pola tanaman tumpang sari. Jenis tanaman yang ditanam antara lain tanaman kayu seperti Binuang dan Balsa dengan tanaman MPTS berupa Pala. Meski baru berumur 1 tahun, tanaman Balsa mampu tumbuh dengan subur dengan tinggi tanaman mencapai kurang lebih 3 meter. Potret tutupan tajuk tagakan Balsa menjadi salah satu bukti nyata bahwa kegiatan RHL mampu meningkatkan tutupan hutan dan lahan pada Daerah Aliran Sungai sesuai dengan sasaran program yang diharapkan.





Penanaman mangrove oleh mahasiswa UI sebagai bentuk kepedulian terhadap perbaikan lingkungan



Sebaran Luas Penanaman Insentif (Ha)
Kebun Bibit Rakyat, Kebun Bibit Desa, Persemaian Permanen dan Bibit Produktif
Per Satker/UPT Tahun 2022

No	Satker	Kebun Bibit rakyat	Kebun Bibit Desa	Bibit Produktif	Persemaian Permanen	Persemain Skala Besar	Jumlah
1	Krueng Aceh	1.150	250	313	1.250	-	2.963
2	Wampu Sei Ular	551	105	150	1.875	-	2.681
3	Asahan Barumun	300	150	220	1.875	12.500	15.045
4	Agam Kuantan	1.031	-	136	4.029	-	5.196
5	Batanghari	329	225	111	1.875	-	2.540
6	Indragiri Rokan	698	251	233	3.750	-	4.932
7	Sei Jang Duriangkang	310	75	95	1.250	-	1.730
8	Ketahun	550	257	306	3.125	-	4.238
9	Musi	2.400	1.600	200	-	-	4.200
10	Baturusa Cerucuk	285	75	149	1.875	-	2.384
11	Way Seputih Way Sekampung	2.638	142	313	6.250	-	9.343
12	Citarum Ciliwung	2.716	116	169	6.250	20.000	29.251
13	Cimanuk Citanduy	1.750	150	438	5.375	-	7.713
14	Pemali Jratun	550	214	145	4.375	-	5.284
15	Solo	1.350	150	252	2.000	-	3.752
16	Serayu Opak Progo	1.175	200	278	2.000	-	3.653
17	Brantas Sampean	2.475	103	584	3.750	-	6.912
18	Kapuas	1.422	75	349	2.500	-	4.346
19	Kahayan	1.569	240	145	2.500	-	4.454
20	Barito	300	125	291	4.625	-	5.341
21	Mahakam Berau	800	150	117	2.000	2.500	5.567
22	Tondano	171	-	95	3.750	200	4.216
23	Bone Bolango	301	100	178	1.875	-	2.454
24	Palu Poso	340	360	95	1.875	-	2.670
25	Karama	550	75	145	250	-	1.020
26	Jeneberang Saddang	2.569	166	862	2.000	-	5.597
27	Sampara	550	75	76	1.250	-	1.951
28	Unda Anyar	792	135	170	538	180	1.815
29	Dodokan Moyosari	1.100	425	283	4.988	-	6.796
30	Benain Noelmina	1.407	172	507	8.500	2.500	13.086
31	Waehapu Batu Merah	800	75	199	1.250	-	2.324
32	Ake Malamo	550	75	170	750	-	1.545
33	Remu Ransiki	300	75	75	600	-	1.050
34	Memberamo	469	50	75	1.750	-	2.344
35	BPTH Wilayah I	-	-	-	6.250	-	6.250
36	BPTH Wilayah II	-	-	-	5.251	-	5.251
	JUMLAH	34.248	6.436	7.924	103.406	37.880	189.894

Keterangan :

Capaian realisasi penanaman dari penyediaan bibit produktif, bibit persemaian permanen, dan bibit persemaian skala besar diasumsikan dengan konversi 200 - 400 batang per-hektar.

Kegiatan penyediaan bibit berkualitas memiliki peran penting dalam keberhasilan rehabilitasi hutan dan lahan yang dilakukan. Upaya untuk memproduksi bibit berkualitas secara massal, rutin, cepat, dan berkelanjutan dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan bibit. Saat ini terdapat Persemaian Permanen (PP) yang tersebar di seluruh Indonesia yang menghasilkan bibit berkualitas untuk mendukung kegiatan RHL terutama untuk penanaman insentif (mengakomodir permintaan masyarakat). Bahkan tahun 2022 telah dibangun Persemaian Skala Besar yang mendukung Destinasi Super Prioritas. Jumlah produksi bibit dari persemaian permanen sebanyak 41.362.040 batang dan dari persemaian skala besar sebanyak 19.300.000 batang.

Penyediaan bibit berkualitas juga dilakukan melalui penyediaan bibit produktif, yaitu bibit tanaman berkayu yang menghasilkan buah dan memiliki nilai ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta berfungsi sebagai tanaman penghijauan. Fasilitasi bibit produktif tahun 2022 mencapai 3.167.994 batang. Bahkan untuk mempercepat rehabilitasi hutan dan lahan, juga ada skema penyediaan bibit melalui kegiatan Kebun Bibit Rakyat (KBR) dan Kebun Bibit Desa (KBD). KBR yang berhasil dibangun di tahun 2022 sebanyak 1.076 Unit dan KBD sebanyak 166 unit.

Kegiatan produksi bibit di PP, KBR maupun KBD tidak semata-mata menghasilkan bibit berkualitas saja, namun sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat pada kegiatan RHL. Bahkan untuk kegiatan KBR dan KBD, pembuatan dan penanaman bibitnya dikelola oleh lembaga desa/ kelompok adat/ kelompok masyarakat/ kelompok tani hutan perhutanan sosial, yang beranggotakan baik laki-laki dan/atau perempuan.

Sebagai contoh untuk pembuatan 1 unit KBR diperuntukkan untuk 1 kelompok, dimana jumlah orang yang terlibat minimal sebanyak 15 orang apabila bibit tersebut di tanam di luar kawasan hutan dan minimal sebanyak 30 orang apabila bibit di tanam di dalam kawasan hutan. Dari anggota kelompok yang ikut terlibat, juga tidak menutup kemungkinan adanya partisipasi dari anggota baik laki-laki dan/atau perempuan. Bahkan di beberapa lokasi justru partisipasi perempuan jauh lebih banyak. Hal ini tentu saja sesuai dengan arah kebijakan pengarusutamaan gender lingkup Ditjen PDASRH yang memberikan akses yang setara terhadap sumberdaya yang ada.

SEE ABILITY, NOT DIFABILITY



Desa Sriwedari berdiri di ujung paling barat perbukitan Menoreh. Terdapat kelompok tani disabilitas yang mampu mengelola Kebun Bibit Rakyat bantuan dari KLHK melalui BPDAS SOP.

Tri (Ketua Kel. Tani) seolah mewakili suara dari penyandang disabilitas. Lelaki ini kehilangan tangan kirinya akibat kecelakaan dua tahun lalu. Sebagian besar anggota Karya Mandiri adalah sejawat disabilitas yang menekuni dan mengembangkan usaha pembibitan.

Karya Mandiri bentukan kelompok dari Lembaga Sosial Masyarakat Bintari yang terdiri dari anggota penyandang disabilitas, mendapat bantuan berupa KBR. Pelatihan dilakukan selama 3 bulan untuk membuat bibit. Dari target 33.000 sengan dan 2.000 alpukat telah dikerjakan dengan baik. Keberhasilan tersebut membuktikan keterbatasan tak menghalangi anggota berkarya seperti orang lain. Harapan ketua kelompok awalnya berkembang perlahan, kedepannya lokasi ini bisa tempat ekoeduwisata serta outbond anak-anak. Harapan lain agar bapak ibu yang mampir kesini dapat membantu menyuarakan pemasaran bibit yang telah dilakukan oleh para penyandang disabilitas.

Realisasi pembuatan Kebun Bibit Rakyat, Kebun Bibit Desa, Persemaian Permanen dan Bibit Produktif Per Satker/UPT Tahun 2022

No	Satker	Kebun Bibit Rakyat (Unit)	Kebun Bibit Desa (Unit)	Bibit Produktif (Batang)	Persemaian Permanen (Batang)	Persemaian Skala Besar (Batang)
1	Krueng Aceh	46	10	125.000	500.000	-
2	Wampu Sei Ular	18	3	60.000	750.000	-
3	Asahan Barumon	12	6	88.000	750.000	5.000.000
4	Agam Kuantan	16	-	54.335	1.611.750	-
5	Batanghari	12	9	44.500	750.000	-
6	Indragiri Rokan	21	4	93.009	1.500.000	-
7	Sei Jang Duriangkang	12	3	38.000	500.000	-
8	Ketahun	22	4	122.275	1.250.000	-
9	Musi	32	17	80.000	-	-
10	Baturusa Cerucuk	12	3	59.625	750.000	-
11	Way Seputih Way Sekampung	45	3	125.000	2.500.000	-
12	Citarum Ciliwung	107	4	67.500	2.500.000	8.000.000
13	Cimanuk Citanduy	70	6	175.000	2.150.000	-
14	Pemali Jratun	22	6	58.000	1.750.000	-
15	Solo	54	6	100.780	800.000	-
16	Serayu Opak Progo	47	8	111.000	800.000	-
17	Brantas Sampean	99	2	233.600	1.500.000	-
18	Kapuas	52	3	139.500	1.000.000	-
19	Kahayan	22	3	58.000	1.000.000	-
20	Barito	12	5	116.500	1.850.000	-
21	Mahakam Berau	32	6	46.950	800.000	1.000.000
22	Tondano	4	-	38.000	1.500.000	2.500.000
23	Bone Bolango	12	4	71.000	750.000	-
24	Palu Poso	12	5	38.000	750.000	-
25	Karama	22	3	58.000	100.000	-
26	Jeneberang Sadding	45	3	344.754	800.000	-
27	Sampara	22	3	30.500	500.000	-
28	Unda Anyar	24	3	68.000	215.000	1.800.000
29	Dodokan Moyosari	40	17	113.091	1.995.000	-
30	Benain Noelmina	42	6	202.695	3.400.000	1.000.000
31	Waehapu Batu Merah	32	3	79.530	500.000	-
32	Ake Malamo	22	3	67.850	300.000	-
33	Remu Ransiki	12	3	30.000	240.000	-
34	Memberamo	22	2	30.000	700.000	-
35	BPTH Wilayah I	-	-	-	2.500.000	-
36	BPTH Wilayah II	-	-	-	2.100.290	-
JUMLAH		1.076	166	3.167.994	41.362.040	19.300.000



Komunitas Mahasiswa Pramuka yang mengambil bibit dari persemaian permanen Solo untuk kegiatan penanaman acara Pramuka.



Seorang anggota komunitas Mapala Sang Guru UMS menunjukkan KTP sebagai syarat administrasi untuk mengambil bibit yang akan digunakan untuk kegiatan penanaman.



Harapan panen buah Alpukat dari penanaman bibit produktif oleh Kelompok Tani Rimbaloka di Desa Bulusan, Kec. Karangdowo, Kab. Klaten.



Saat ini telah ada 54 Persemaian Permanen yang tersebar di seluruh Indonesia untuk memenuhi kebutuhan bibit baik untuk rehabilitasi maupun untuk memenuhi permintaan masyarakat dalam melakukan penghijauan lingkungan.

Sesuai arahan Presiden RI, untuk mendukung kegiatan RHL, penghijauan lingkungan, dan pemulihan daerah bencana, Kementerian LHK melalui Ditjen PDASRH diminta untuk membangun persemaian skala besar. Sebanyak enam persemaian skala besar yang saat ini telah terbangun dan berproduksi yaitu Persemaian Rumpin (Jabar), Toba (Sumut), Bajo (NTT), Likupang (Sulut), Suwung (Bali) serta Mentawir (Ibu Kota Negara Kaltim).

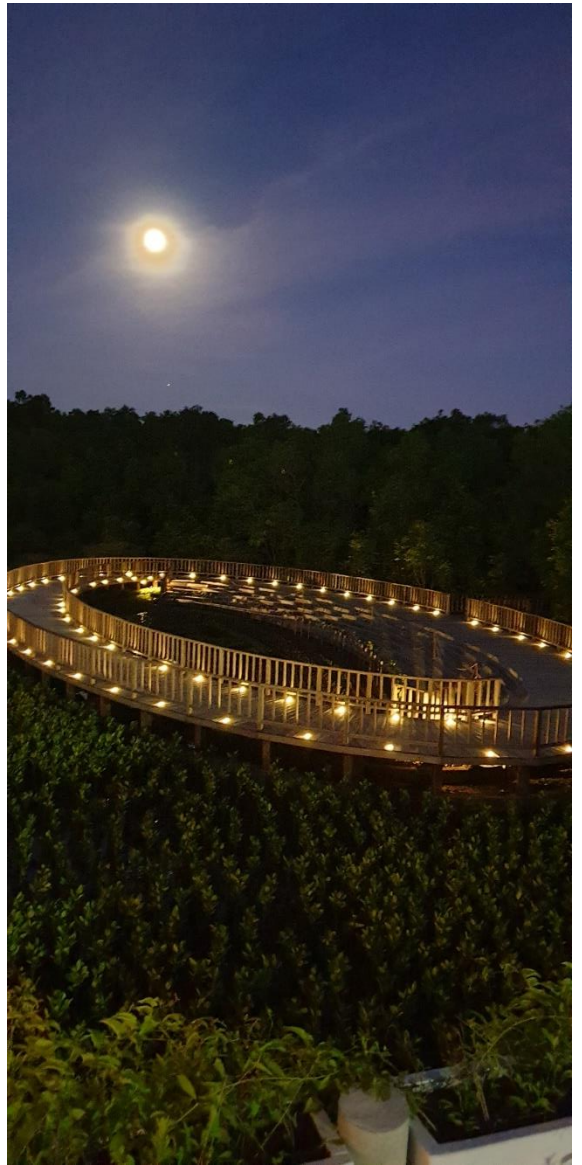


Peresmian Persemaian Rumpin oleh Presiden RI



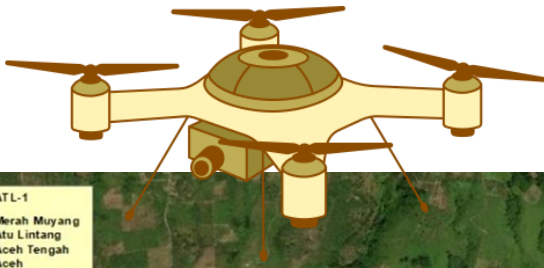


Persemaian Suwung Bali untuk mendukung kegiatan G-20

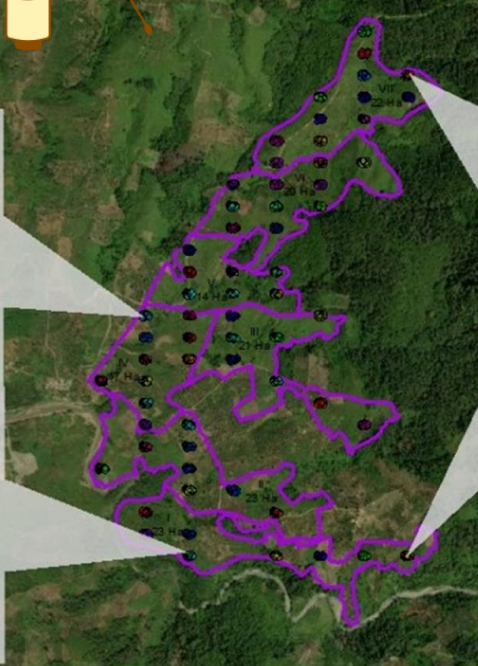
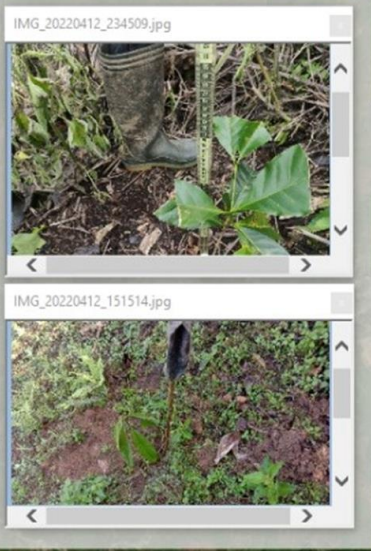


PENGENDALIAN KEGIATAN RHL DENGAN GEOTAGGING

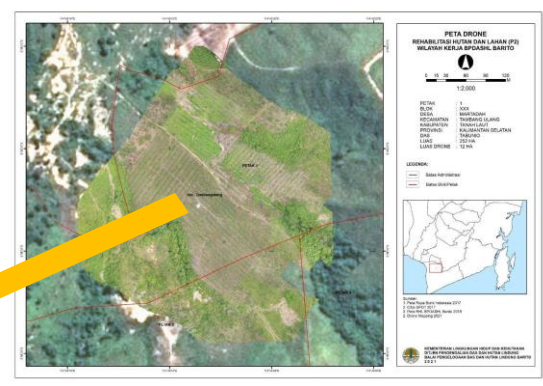
Sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik dan peningkatan keberhasilan RHL



BLOK ATL-1
 Desa : Merah Mulyang
 Kecamatan : Atu Lintang
 Kabupaten : Aceh Tengah
 Provinsi : Aceh
 Luas : 140 Ha



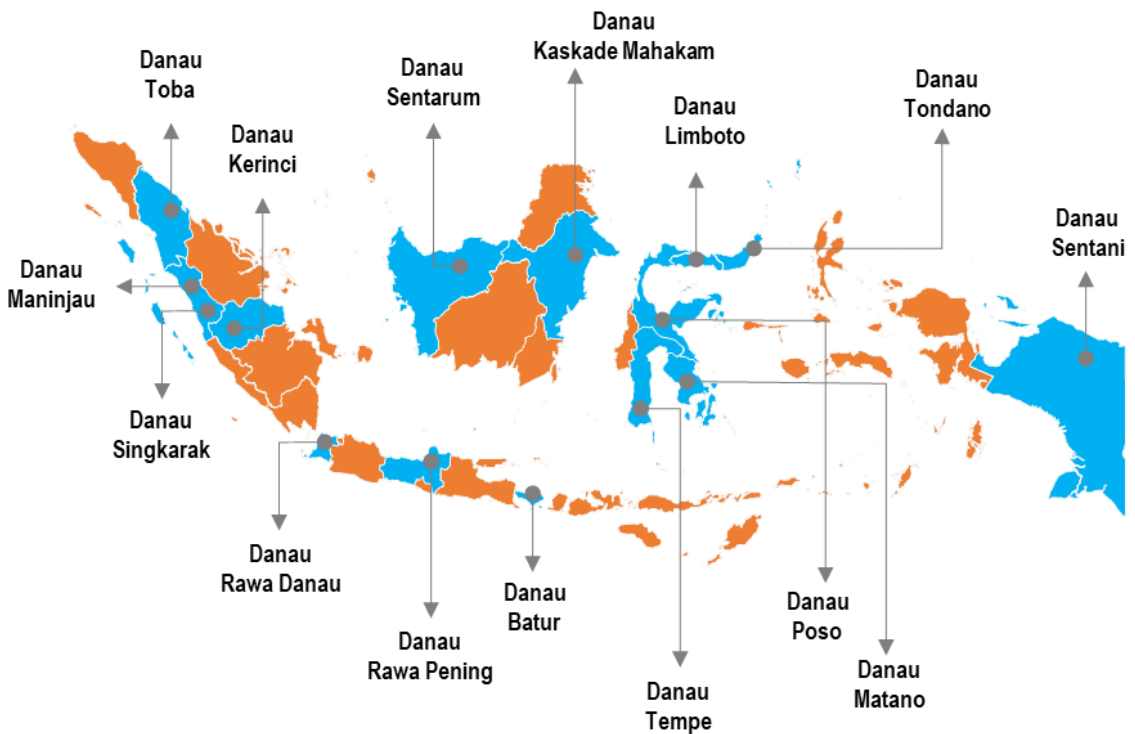
PENERAPAN MRV DALAM MONITORING PELAKSANAAN RHL



IKP :

Jumlah Danau yang Dikendalikan Kerusakannya

Berkeanaan dengan danau, terdapat 15 Danau Prioritas Nasional untuk dijaga, dibenahi dan dipulihkan kondisinya, yaitu : (1) Danau Rawa Pening (Jateng); (2) Rawa Danau (Banten); (3) Danau Batur (Bali); (4) Danau Toba (Sumut); (5) Danau Kerinci (Jambi); (6) Danau Maninjau (Sumbar); (7) Danau Poso (Sulteng); (8) Danau Cascade Mahakam (Kaltim); (9) Danau Singkarak (Riau); (10) Danau Tondano (Sulut); (11) Danau Tempe dan (12) Danau Matano (Sulsel); (13) Danau Limboto (Gorontalo); (14) Danau Sentarum (Kalbar); dan (15) Danau Sentani (Papua).



Dalam rangka mendukung kegiatan pengendalian kerusakan pada 15 Danau Prioritas, beberapa kegiatan yang dilakukan Ditjen PDASRH pada tahun 2022 yaitu (1) pemantauan dan evaluasi capaian target Rencana Pengelolaan Danau (2) monitoring dan evaluasi rehabilitasi DTA Danau serta (3) identifikasi dan penilaian kerusakan segmen sungai.

IKHTISAR KINERJA

Jumlah danau yang dikendalikan
kerusakannya

Rencana 15 Danau

Capaian 15 Danau

Kinerja 2022 100,00 %

Y o Y (2021-2022) Tetap

Capaian terhadap
renstra 2020-2024 60,00 %

Pencapaian kinerja untuk IKP jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya di tahun 2022 terealisasi sebesar 100%. Dari target 15 danau yang diintervensi mampu terealisasi seluruhnya. Jika dibandingkan dengan pencapaian kinerja tahun sebelumnya maka kinerjanya tetap. Dan apabila capaian kinerja sampai dengan tahun 2022 dibandingkan dengan target capaian dalam Renstra 2020-2024, maka telah terealisasi sebesar 60 % atau sesuai dengan target sampai dengan pelaksanaan di tahun ketiga.

Jenis dan jumlah intervensi untuk masing-masing danau disesuaikan dengan kondisi fisik dan anggaran yang tersedia.

(1) Kegiatan pemantauan dan evaluasi capaian target Rencana Pengelolaan Danau dimaksudkan agar rencana aksi yang telah dilaksanakan dan sesuai dengan target yang telah disepakati bersama dalam rangka upaya-upaya penyelamatan Danau Prioritas Nasional I dapat terus diawasi dan dievaluasi untuk mengambil tindakan kebijakan selanjutnya. Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa kunjungan koordinasi dengan berbagai pihak terkait baik itu instansi pemerintah, swasta atau pihak lain yang berkepentingan. Selain itu dilaksanakan juga melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan melalui media virtual maupun secara tatap muka langsung. Pemantauan dan evaluasi capaian target rencana pengelolaan danau ini dilaksanakan pada 15 danau prioritas nasional I.

Potret Danau Singkarak di Riau



Potret Danau Rawa Pening di Jawa Tengah



Kegiatan pengendalian kerusakan danau dan segmen sungai pada 15 Danau Prioritas

No	Danau	Intervensi Th. 2022
1	Rawa Pening	● ● ●
2	Rawa Danau	● ● ●
3	Batur	● ● ●
4	Toba	● ● ●
5	Kerinci	● ● ●
6	Maninjau	● ● ●
7	Poso	● ● ●
8	Cascade Mahakam	● ● ●
9	Singkarak	● ● ●
10	Tondano	● ● ●
11	Tempe	● ● ●
12	Matano	● ● ●
13	Limboto	● ● ●
14	Sentarum	● ● ●
15	Sentani	● ● ●

- Pemantauan dan evaluasi capaian target RP Danau
- Monitoring dan evaluasi rehabilitasi DTA Danau
- Identifikasi dan penilaian kerusakan segmen sungai

(2) Kegiatan monitoring dan evaluasi rehabilitasi DTA Danau dimaksudkan untuk mengawasi dan mengevaluasi hasil kerja dari mendapatkan batas-batas DTA danau yang dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan kegiatan dalam rangka pengendalian kerusakan danau, khususnya upaya-upaya rehabilitasi baik dalam bentuk vegetatif maupun sipil teknis. Kegiatan ini dilaksanakan di 14 danau prioritas nasional I, sedangkan Danau Poso tidak dapat dilaksanakan karena adanya *refocussing* anggaran.

Identifikasi dan penilaian kerusakan segmen sungai, dimaksudkan untuk mendapatkan data-data kondisi sungai-sungai yang menjadi inlet dari 15 danau prioritas nasional, sehingga dapat diketahui cara untuk pengendalian kerusakan maupun menjaga kondisi sungai tetap baik yang sangat berpengaruh terhadap kondisi badan air danau.



Ekohidrolika

Selain kegiatan pengendalian kerusakan danau dan segmen sungai, di tahun 2022 juga dilaksanakan kegiatan pemulihan mata air dan pembuatan bangunan pengendali kerusakan perairan darat yang secara tidak langsung juga diarahkan untuk mendukung pengendalian kerusakan danau.

Kegiatan pemulihan mata air dilakukan dengan melakukan penyusunan profil mata air yang tujuannya untuk mendapatkan data-data tentang titik mata air prioritas sehingga dapat menjadi dasar untuk penanganan perlindungan mata air ke depannya. Selain itu dilakukan juga penyusunan rencana pembangunan model kampung ramah air hujan (KRAH). Pada tahun 2022 telah terealisasi 50 dokumen profil mata air dan 18 dokumen KRAH.



Instalasi Pemanenan Air Hujan

Sementara untuk kegiatan pembuatan bangunan pengendali kerusakan perairan darat, pada tahun 2022 telah berhasil membangun Instalasi Pemanenan Air Hujan (IPAH) sebanyak 199 unit, Sumur Resapan Air (SRA) sebanyak 181 unit, Biopori sebanyak 650 unit dan Ekohidrolika sebanyak 34 unit.



Papan Pengumuman Larangan Bangunan di Sempadan Danau



Pengurangan KJA



Pengkayaan Jenis-jenis Ikan Lokal



Pemantauan Kualitas Air Danau



Normalisasi Sungai



RHL Vegetatif



RHL Sipil Teknis



Pembinaan Masyarakat Industri Non-Agro Ramah Lingkungan

Pengendalian erosi dan sedimentasi di DTA Danau

Kolaborasi Penyelamatan **DANAU RAWA PENING**



Sebelum



Saat proses

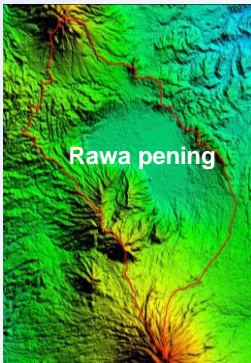


Setelah



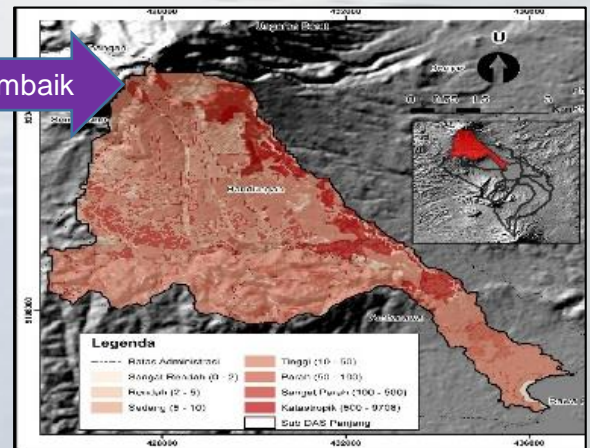
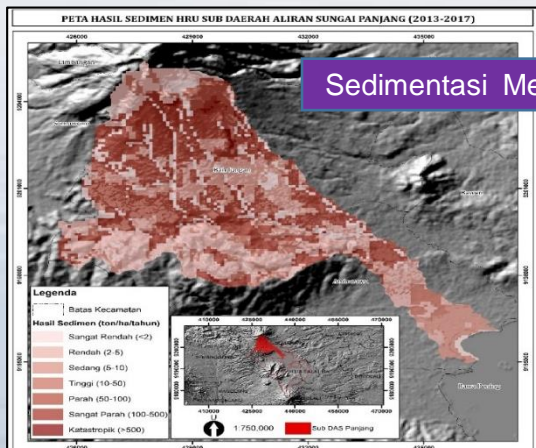
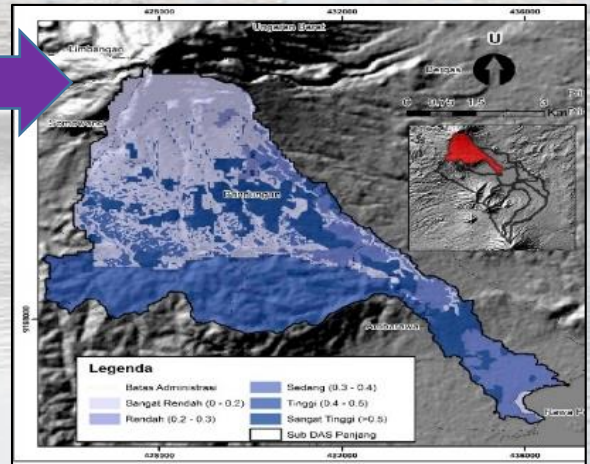
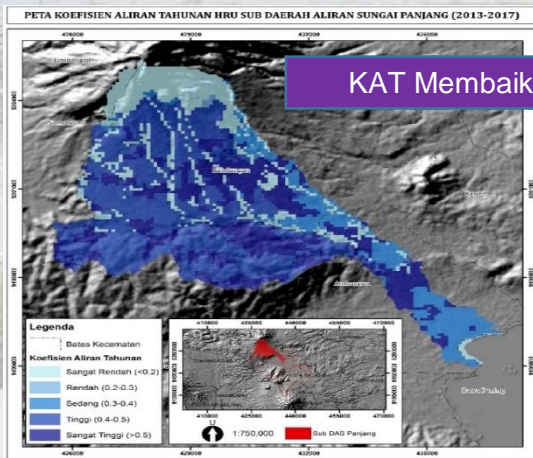
Pembersihan Enceng Gondok di Danau Rawa Pening

REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN KRITIS UNTUK KONSERVASI AIR DAERAH TANGKAPAN AIR RAWA PENING-JAWA TENGAH



Terjadi perbaikan Koefisien Aliran Tahunan (KAT) & tingkat sedimentasi dengan intervensi:

- a. *Argoforetry* seluas 345 Ha (2016)
- b. Rehabilitasi Hutan-Lahan 238,2 Ha (2017-2019)
- c. Kebun Bibit Rakyat 7 unit seluas 140 ha (2019 – 2022)
- d. Kombinasi intervensi vegetatif & konservasi tanah-air skema UPSA seluas 5 Ha (2021)



IKP :

Nilai SAKIP Ditjen PDASRH

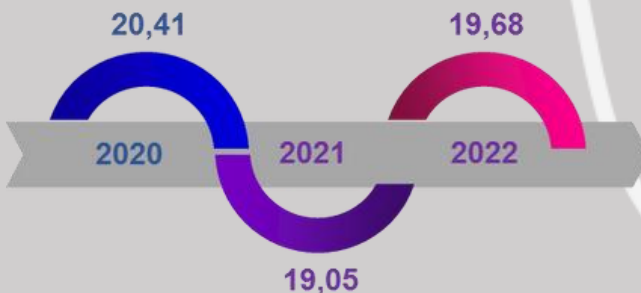
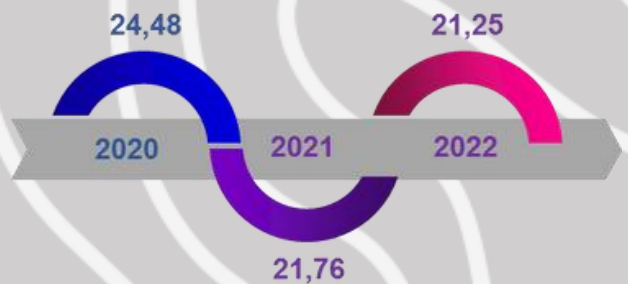
Capaian kinerja kegiatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Direktorat Jenderal PDASRH pada tahun 2022, dapat dilihat dari pencapaian indikator nilai SAKIP Ditjen PDASRH.

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim dari Inspektorat Jenderal Kementerian LHK pada tahun 2022, Ditjen PDASRH memperoleh nilai sakip sebesar 71,58 Poin dari target 78,00 poin. Sehingga capaian kerjanya sebesar 91,77%.

Penilaian SAKIP di hitung berdasarkan 4 komponen manajemen kinerja, yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi akuntabilitas kinerja internal. Uraian untuk masing-masing komponen beserta upaya yang dilakukan untuk peningkatan kinerja sebagai berikut.

PERENCANAAN KINERJA

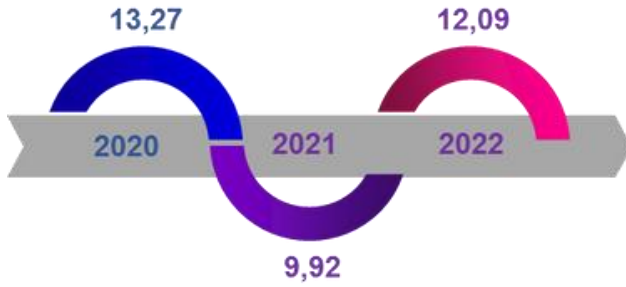
Komponen perencanaan kinerja, mengalami penurunan hingga tahun 2022. Penguatan perencanaan kinerja yang telah dilakukan antara lain melakukan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan melakukan penyusunan pedoman teknis internal Ditjen PDASRH.



PENGUKURAN KINERJA

Komponen pengukuran kinerja, mengalami peningkatan pada tahun 2022. Penguatan komponen ini yang telah dilakukan antara lain pengukuran kinerja menjadi dasar dalam pemberian penghargaan dan hukuman (*reward and punishment*).



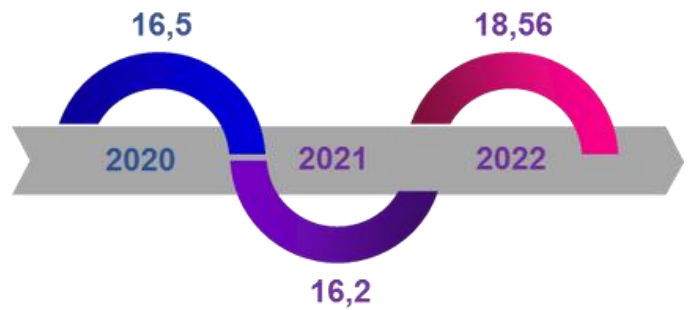


PELAPORAN KINERJA

Komponen pelaporan kinerja mengalami peningkatan pada tahun 2022. Penguatan komponen pelaporan kinerja yang telah dilakukan antara lain mempublikasikan LKj dan penyajian strategi/kebijakan pada tahun 2022 mengikuti SOTK terbaru.

EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

Komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal, mengalami peningkatan pada tahun 2022. Penguatan yang telah dilakukan antara lain evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah dilakukan secara berjenjang pada unit kerja.



Kegiatan Penyegaran Pejabat Fungsional Pengendali Ekosistem Hutan, untuk menciptakan pejabat fungsional yang melek dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi serta isu-isu terbaru terkait tugas dan fungsi organisasi.



Kegiatan pameran bidang PDASRH untuk mengenalkan produk hasil dari RHL, seperti buah alpukat yang berhasil di tanam di wilayah kerja BPDAS Way Seputih Way Sekampung



IKHTISAR KINERJA

Nilai Sakip Ditjen PDASRH

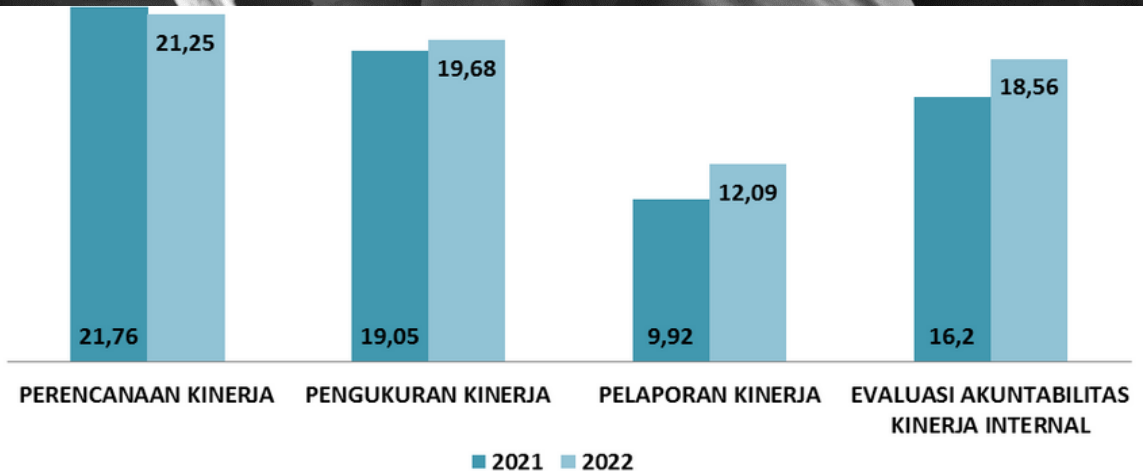
Rencana 78,00 Poin

Capaian 72,56 Poin

Kinerja 2022 91,77 %

Y o Y (2021-2022) ▼ 0,97 %

Capaian terhadap renstra 2020-2024 93,03 %



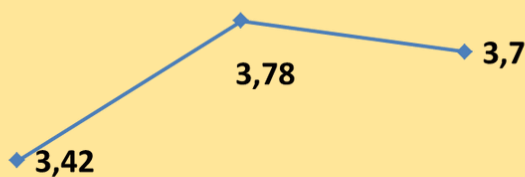
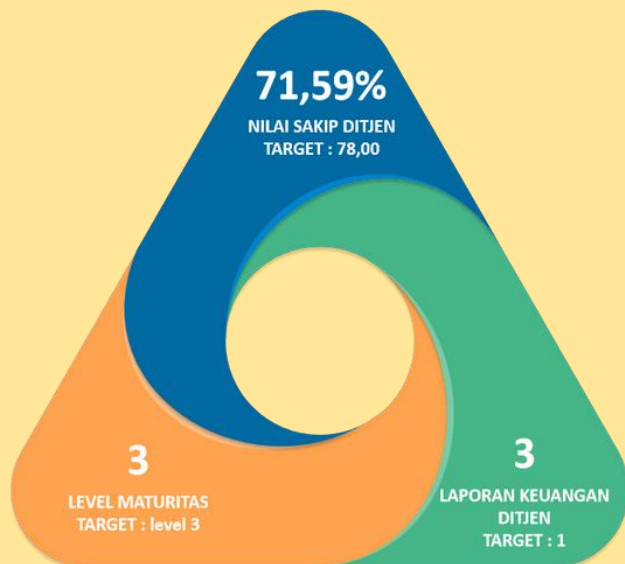
Nilai realisasi dan efektifitas pelaksanaan kegiatan tahun 2022 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2021. Nilai SAKIP yang sebelumnya 72,56 turun menjadi 71,59. Meski mengalami penurunan sebesar 0,97 poin, namun nilai SAKIP Ditjen PDASRH masih masuk kategori Sangat Baik (BB).

Penurunan nilai SAKIP tahun 2022 dipengaruhi oleh perubahan peraturan terkait penilaian. Dasar perhitungan nilai SAKIP yang sebelumnya ditentukan oleh 5 komponen, pada tahun 2022 berubah menjadi 4 komponen. Komponen Evaluasi internal yang sebelumnya memiliki bobot 10,00 dan capaian kinerja memiliki bobot 20,00 menjadi satu komponen yaitu evaluasi akuntabilitas kinerja internal dengan bobot 25,00.

Dalam upaya meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima, Ditjen PDASRH tidak hanya berkontribusi di dalam pencapaian nilai SAKIP tetapi juga berkontribusi terkait peningkatan level maturitas SPIP dan penyusunan laporan keuangan Ditjen PDASRH yang tertib dan akuntabel.

Penilaian level maturitas difokuskan pada tiga komponen SPIP, yaitu perencanaan, struktur dan proses serta pencapaian tujuan SPIP.

Nilai Maturitas SPIP pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 0,08 poin jika dibandingkan dengan tahun 2021.



2020

2021

2022





Penandatanganan kerjasama “sinergitas dalam rangka mewujudkan kampus lembaga pendidikan dan pelatihan POLRI sebagai kampus hijau, dengan menyediakan lokasi penanaman seluas 30% dari luasan kampus pada Satdikpolri”.



Pembinaan pegawai untuk menjadikan ASN yang kompak dan selalu meningkatkan kinerja





Memperkuat jiwa korsa dan menguatkan rasa nasionalisme sebagai ASN Ditjen PDASRH pada peringatan hari kemerdekaan RI



B. Capaian Kinerja Kegiatan

Keberhasilan pencapaian kinerja program tahun 2022 tentu saja tidak lepas dari keberhasilan capaian kinerja kegiatan. Dari 7 (tujuh) kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2022, sebanyak tiga kegiatan memiliki rata-rata capaian kinerja lebih dari 100%, dua kegiatan memiliki rata-rata capaian kinerja 100%, dan dua kegiatan memiliki rata-rata capaian kinerja kurang dari 100%.



Untuk proporsi capaian kinerja kegiatan dari (17) tujuh belas IKK menunjukkan bahwa sebesar 29 % memiliki capaian lebih dari 100%, sebanyak 53 % memiliki capaian 18 % serta sisanya memiliki capaian kurang dari 100%.

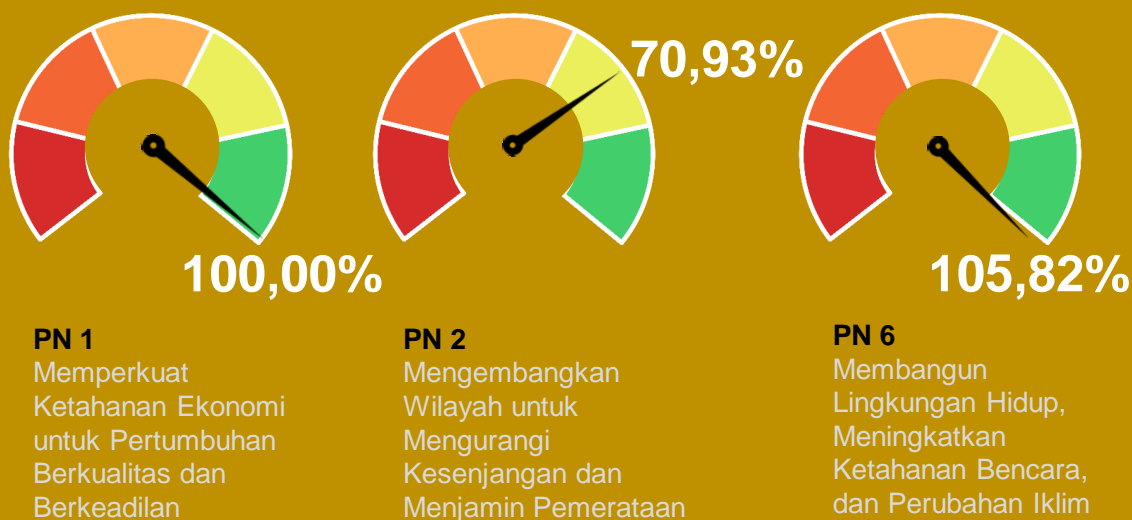
Kegiatan	Sasaran Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target 2022	Realisasi	Persentase	Satuan
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen PDASRH	Meningkatnya kondisi birokrasi dan layanan publik yang agile, efektif, dan efisien lingkup Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	78,00	71,58	91,77	Poin
		Level Maturitas SPIP Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan	3	3	100,00	Level
		Laporan Keuangan Ditjen Direktorat Jenderal Pengendalian DAS dan Rehabilitasi Hutan yang tertib dan akuntabel	1	1	100,00	Dokumen
Konservasi Tanah dan Air	Meningkatnya luas lahan yang direhabilitasi akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	Luas lahan reklamasi dan rehabilitasi DAS akibat kegiatan penggunaan kawasan hutan	15.000	18.498	123,32	Hektar
		Menurunnya sedimentasi dalam DAS	Jumlah bangunan konservasi tanah dan air	2.760	2.985	108,15
Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai	Tersedianya informasi baseline DAS	Jumlah informasi pemantauan tata air dan EWS banjir pada DAS rawan bencana untuk mendukung sistem informasi DAS real time	108	108	100,00	DAS
		Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	34	34	100,00	Lembaga /forum
Rehabilitasi Hutan	Meningkatnya luas tutupan hutan dan lahan secara vegetatif	Luas rehabilitasi hutan dan lahan secara vegetatif	30.850	30.712	99,55	Hektar
		Luasan rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	1.500	1.064	70,93	Hektar
Rehabilitasi Mangrove	Meningkatnya kualitas ekosistem mangrove	Luas ekosistem mangrove yang direhabilitasi	1.100	1.211	110,09	Hektar
		Jumlah lembaga/forum peduli Mangrove yang meningkat kapasitasnya	34	34	100,00	Lembaga /forum
Pengembangan Perbenihan Tanaman Hutan	Meningkatnya kualitas dan distribusi perbenihan tanaman hutan	Luas sumber benih unggul yang dibangun	85	85	100,00	Hektar
		Jumlah bibit berkualitas dan bibit produktif	62.680.916	63.830.034	101,83	Batang
		Jumlah benih berkualitas dari sumber benih bersertifikat	39.000.000	43.362.139	111,18	Butir
Rehabilitasi Perairan Darat	Meningkatnya kualitas mata air, danau, dan sungai beserta ekosistemnya pada DAS prioritas	Jumlah mata air yang memiliki rencana pemulihannya	50	50	100,00	Mata Air
		Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	15	15	100,00	Danau
		Jumlah bangunan pengendalian kerusakan perairan darat	1.064	1.064	100,00	Unit

C. Capaian Kinerja Prioritas Nasional

Dari sebanyak 7 (tujuh) Agenda Pembangunan (AP) atau Prioritas Nasional (PN), Ditjen PDASRH mendukung 3 dari 4 AP/PN yang di ampu oleh KLHK, yang terdiri dari:

1. PN 01 (Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan)
2. PN 02 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan)
3. PN 06 (Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim).

Dukungan Ditjen PDASRH tahun 2022 dapat dilihat dari pencapaian kinerja untuk masing-masing Prioritas Nasional sebagai berikut.



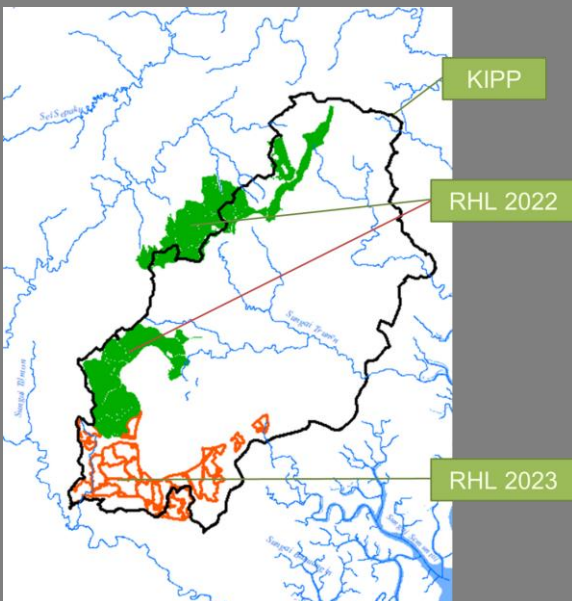
Dari seluruh PN yang didukung Ditjen PDASRH, ternyata PN 2 tidak dapat tercapai, yaitu untuk rincian output Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS Sekitarnya. Dari target rehabilitasi seluas 1.500 Ha hanya terealisasi seluas 1.064 Ha. Salah satu hambatan yang dihadapi untuk pencapaian target adalah lokasi di sekitar IKN yang belum *clear and clean* untuk dilakukan kegiatan rehabilitasi. Upaya yang dilakukan oleh Ditjen PDASRH sampai dengan saat ini adalah dengan terus melakukan pendekatan kepada masyarakat dan mencari lokasi yang sesuai.

Untuk memudahkan melihat kontribusi Ditjen PDASRH dalam pencapaian agenda pembangunan/prioritas nasional maka dapat dilihat dari pelaksanaan dan pencapaian kinerja rincian output yang mendukung masing-masing PN pada tahun 2022. Sebagian besar rincian output yang dilaksanakan Ditjen PDASRH mendukung PN 6 yaitu sebanyak 12 (dua belas) rincian output. Untuk PN 1 didukung dari pencapaian 4 (empat) kinerja output kegiatan serta untuk PN 2 didukung dari pencapaian 1 (satu) rincian output kegiatan.

No.	Rincian Kegiatan	Target	Capaian	%
PN 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan				
1	Bangunan PKPD	1.064 Unit	1.064 Unit	100,00
2	Danau yang Dikendalikan Kerusakannya	15 Danau	15 Danau	100,00
3	Segmen Sungai yang Dikendalikan Kerusakannya	15 Danau	15 Danau	100,00
4	Mata Air yang Dipulihkan	50 Mata Air	50 Mata Air	100,00
PN 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan				
1	Rehabilitasi Hutan dan Lahan di IKN dan DAS Sekitarnya	1.500 Ha	1.064 Ha	70,93
PN 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim				
1	RHL Vegetatif	30.850 Ha	30.712 Ha	99,55
2	RHL Sipil Teknis	2.760 Unit	2.985 Unit	108,15
3	Rehabilitasi Mangrove	1.100 Ha	1.210 Ha	110,09
4	Kelompok Kerja Mangrove	34 Lembaga	34 Lembaga	100,00
5	Rehabilitasi DAS	15.000 Ha	18.498,36 Ha	127,37
6	Sumber Benih Unggul	85 Ha	85 Ha	100,00
7	Bibit Berkualitas & Bibit Produktif	62.680.916 Btg	63.830.034 Btg	101,83
8	Benih Berkualitas	39.000.000 Butir	43.362.139 Butir	111,18
11	Sistem data dan informasi DAS actual/realtime	34 Sistem Informasi	34 Sistem Informasi	100,00
12	Jumlah lembaga/forum peduli DAS yang meningkat kapasitasnya	34 Lembaga	34 Lembaga	100,00



TRANSFORMASI HUTAN ALAM MELALUI RHL DI IKN



- RHL IKN 2022 Seluas 1.500 Ha
- RHL IKN 2022 Seluas 500 Ha di KIPP IKN

Pola tanam I : Intensif 1.100 btg/ha
 Pola tanam II : Pengkayaan 625 btg/ha
 (pada HTI dibawah 1 tahun)
 Pola tanam III : Pengkayaan 625 btg/ha
 (pada lokasi semak belukar)



Jenis Tanaman : Tanaman Endemik,
 MPTS, Fast Growing, dan Tanaman Anti
 Nyamuk

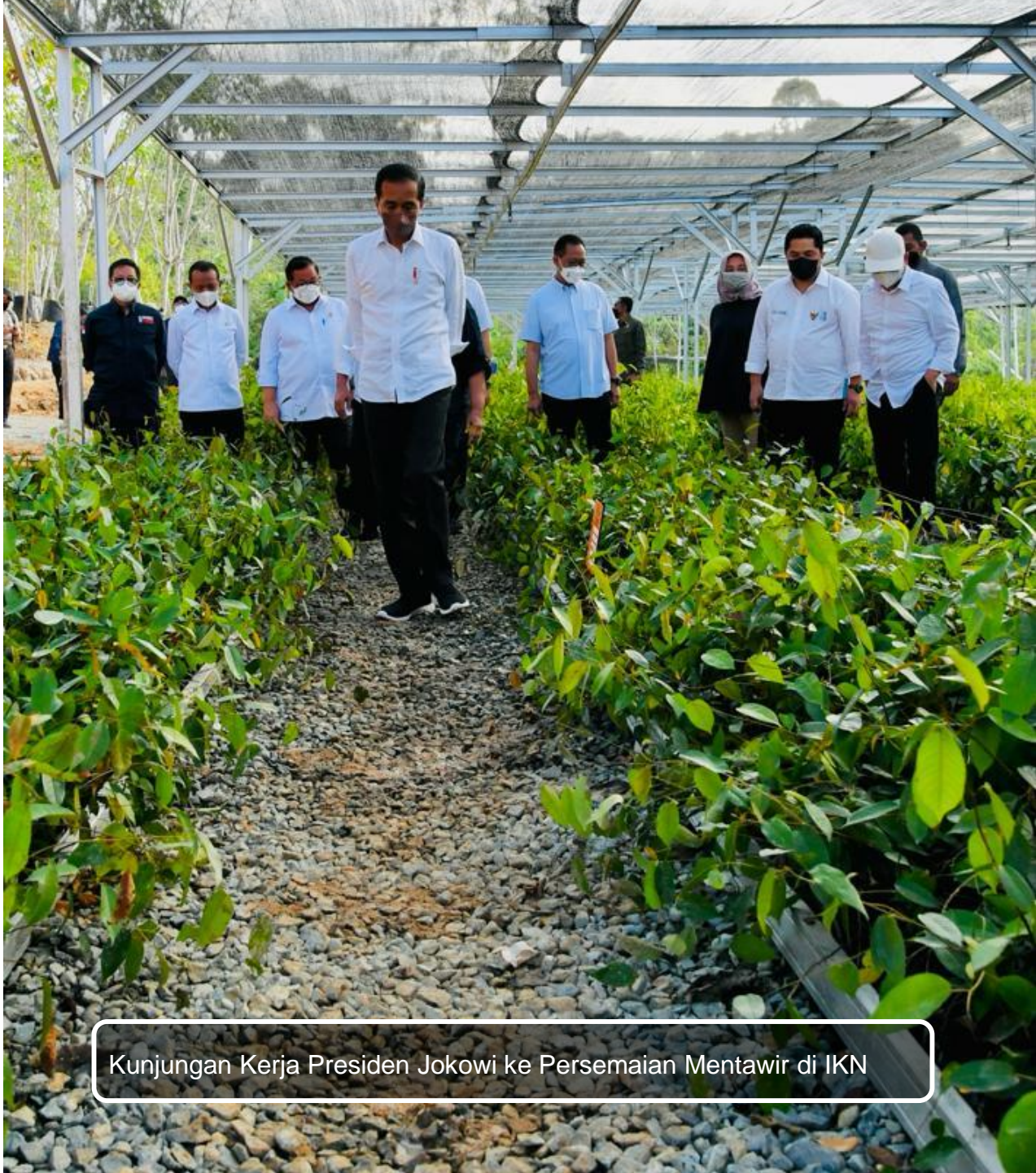
Salah satu tantangan terbesar dalam rehabilitasi hutan dan lahan di IKN dan DAS sekitarnya adalah melakukan transformasi hutan tanaman menjadi hutan hujan tropis Kalimantan. Kriteria, indikator dan parameter antara lain biodiversity, carbon sinks/stocks, iklim mikro, sponges dan tata air serta jasa lingkungan hidup lainnya.

KICKOFF

PEMBANGUNAN PERSEMAIAN MENTAWIR



Produksi bibit dari Persemaian Mentawir akan digunakan untuk RHL di IKN

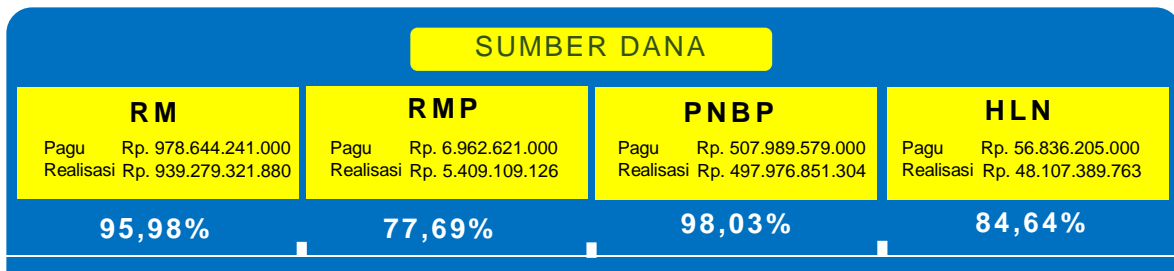
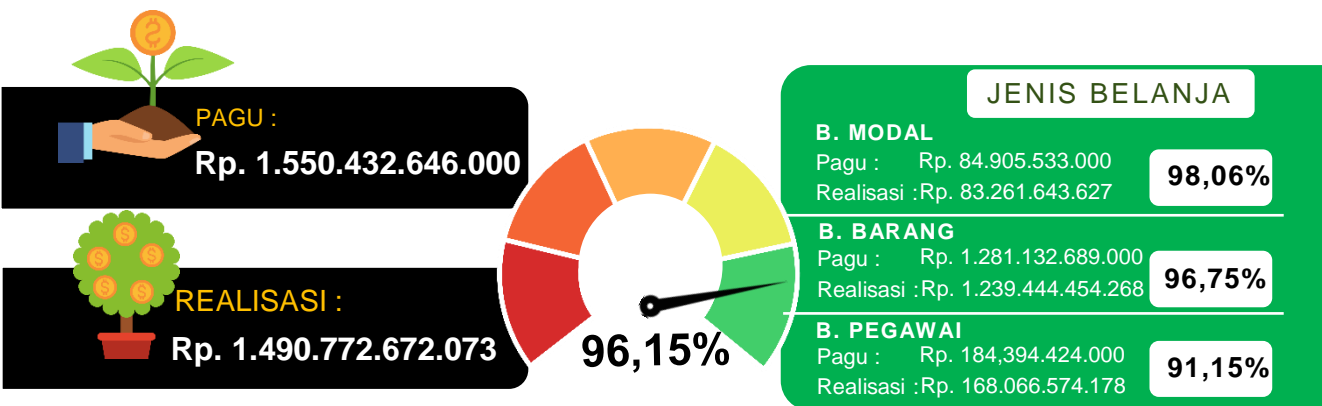


Kunjungan Kerja Presiden Jokowi ke Persemaian Mentawir di IKN

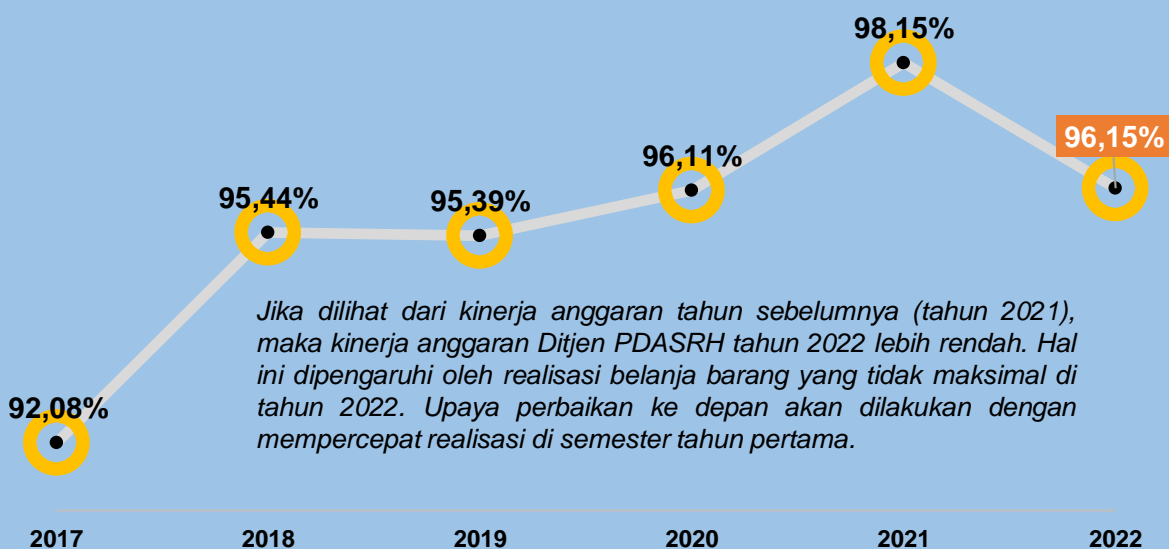


E. Realisasi Anggaran

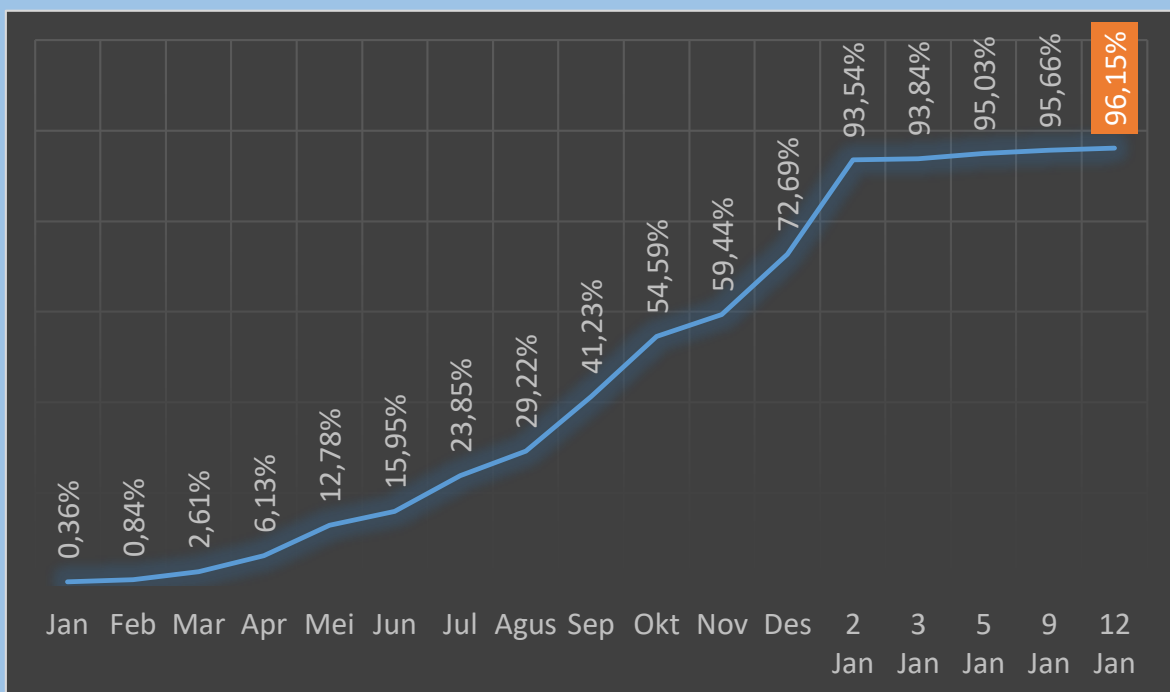
Total pagu APBN Direktorat Jenderal PDASRH tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.550.432.646.000,- yang bersumber dari Rupiah Murni, Rupiah Murni Pendamping, Penerimaan Negara Bukan Pajak, Hibah Luar Negeri. Proporsi terbesar anggaran bersumber dari rupiah murni. Realisasi pelaksanaan anggaran tahun 2022 adalah sebesar Rp.1.490.772.672.073,- atau sebesar 96,15 %.



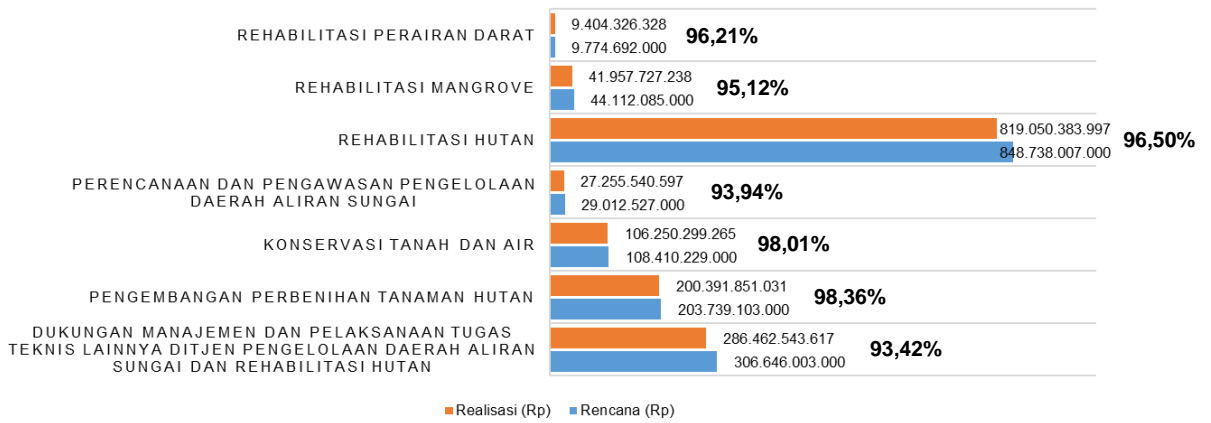
Sumber : Omspan, 12 Januari 2023



Jika dilihat dari kinerja anggaran tahun sebelumnya (tahun 2021), maka kinerja anggaran Ditjen PDASRH tahun 2022 lebih rendah. Hal ini dipengaruhi oleh realisasi belanja barang yang tidak maksimal di tahun 2022. Upaya perbaikan ke depan akan dilakukan dengan mempercepat realisasi di semester tahun pertama.



Jika dilihat dari performa kinerja anggaran setiap periodik di tahun 2022, maka kinerja anggaran Ditjen PDASRH naik cukup drastis di Triwulan IV atau di akhir tahun. Hal ini menunjukkan bahwa pekerjaan fisik di Ditjen PDASRH baru terealisasi di akhir tahun. Sebagai upaya perbaikan kinerja anggaran di tahun berikutnya, Ditjen PDASRH telah menyusun rencana aksi kegiatan untuk membagi dan mempercepat pelaksanaan kegiatan secara proporsional dengan mempertimbangkan aspek sumber daya yang dimiliki.



Dari total pagu anggaran dialokasikan untuk pelaksanaan 7 (tujuh) kegiatan. Proporsi anggaran terbesar dialokasikan untuk kegiatan rehabilitasi hutan. Secara capaian kinerja anggaran tertinggi dicapai pada kegiatan pengembangan perbenihan tanaman hutan.

Untuk capaian kinerja anggaran yang mendukung Prioritas Nasional dapat digambarkan sebagai berikut.

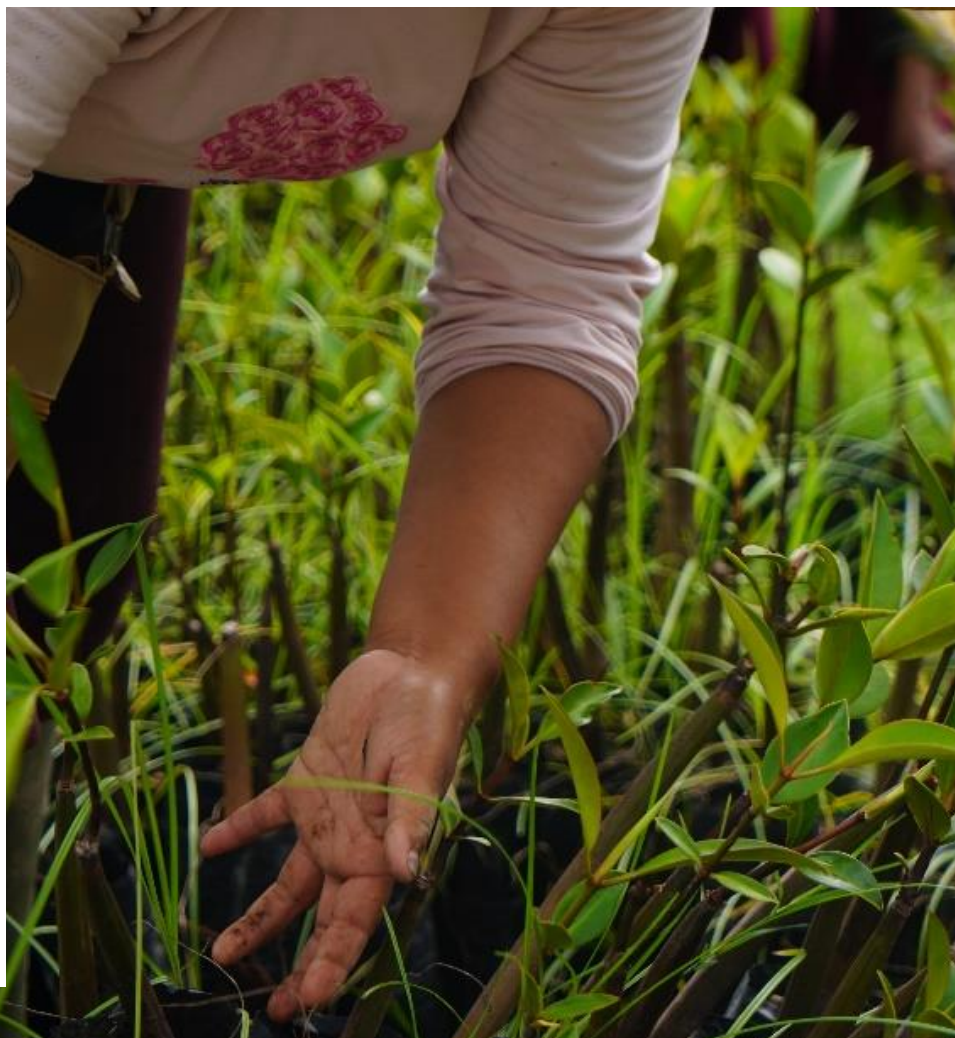




03



PENUTUP



Laporan kinerja Ditjen PDASRH tahun 2022 disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditjen PDASRH.

Akuntabilitas kinerja Ditjen PDASRH tahun 2022 diukur berdasarkan penetapan ukuran kinerja sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja. Capaian kinerja fisik Ditjen PDASRH tahun 2022 secara keseluruhan adalah sebesar 100,86%. Kinerja tersebut didasarkan pada pencapaian 4 (empat) sasaran program (SP) yang diukur dari pencapaian target pada 4 (empat) indikator kinerja program (IKP).

Dalam pencapaian kinerja organisasi tidak lepas dari dukungan sumber daya yang tersedia. Pagu Ditjen PDASRH tahun 2022 sebesar Rp.1.550.432.646.000,- dan terealisasi sebesar 96,15 % atau sebesar Rp Rp. 1.490.772.672.073,-. Berdasarkan pengukuran efisiensi, diperoleh nilai sebesar 1,05 yang dapat menggambarkan kinerja Ditjen PDASRH tahun 2022 berjalan efisien.

Ditjen PDASRH terus melakukan perbaikan dalam setiap pelaksanaan kegiatan terutama peningkatan keberhasilan pelaksanaan kegiatan RHL untuk menjawab akuntabilitas publik. Tentu saja masih ada kekurangan dalam pelaksanaannya, untuk itu ke depan tetap diperlukan perbaikan dalam peningkatan kinerja baik pada aspek perencanaan, pengendalian serta perubahan regulasi. Keberhasilan pembangunan di bidang PDASRH tidak hanya ditentukan oleh kinerja Ditjen PDASRH bersama Unit Pelaksana Teknis di daerah, tetapi juga dipengaruhi oleh kebijakan di sektor lain bahkan pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota dan masyarakat yang ikut berperan dalam pencapaian kinerja Ditjen PDASRH.



REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*), kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Ir. DYAH MURTININGSIH, M.Hum

Jabatan : DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Jabatan : MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Desember 2022

Pihak Kedua,

Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

Pihak Pertama,

Ir. DYAH MURTININGSIH, M.Hum
NIP. 19690802 198803 2 001

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN

No	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target	
			Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)	
a.	Pulihnya kondisi lahan dalam DAS	Menurunnya persentase lahan kritis di dalam DAS	8,08 %	8,08 %
b.	Meningkatnya luas penutupan vegetasi	Luas Tutupan Hutan dan Lahan Hasil Rehabilitasi	35.000 Ha	30.850 Ha
c.	Meningkatnya kualitas pada perairan darat	Jumlah danau yang dikendalikan kerusakannya	15 Danau	15 Danau
d.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif, dan berpelayanan prima	Nilai SAKIP Ditjen PDASRH	78 Poin	78 Poin

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	
		Semula	Menjadi
	Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	1.486.828.240.000	1.233.859.093.000
1.	Perencanaan dan Pengawasan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai		
2.	Perbenihan Tanaman Hutan		
3.	Rehabilitasi Hutan		
4.	Konservasi Tanah dan Air		
	Program Kualitas Lingkungan Hidup	9.856.842.000	9.774.692.000
5.	Rehabilitasi Perairan Darat dan Mangrove		
	Program Dukungan Manajemen	322.739.290.000	306.646.003.000
6.	Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Pengelolaan DAS Dan Rehabilitasi Hutan.		

Jakarta, 29 Desember 2022

MENTERI
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

Prof. Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN DAS DAN REHABILITASI HUTAN

Ir. DYAH MURTININGSIH, M.Hum
NIP. 19690802 198803 2 001



pdashl.menlhk.go.id 

[@ditjen_pdashr](https://www.instagram.com/ditjen_pdashr)



Ditjen PDASRH



[@DitjenPDASRH](https://www.facebook.com/DitjenPDASRH)



Ditjen PDASRH



Gedung Manggala Wanabakti
Blok I, Lantai 12-13 Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat